

**ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA
PETANI HUTAN DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL
DI KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA**

*Analysis of Determinants of Forest Farmer Household Income in
Social Forestry Program in Tombolopao District Gowa Regency*



TESIS

Oleh:

FITRIANI K.

Nomor Induk Mahasiswa : 105051101221

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2023

**ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA
PETANI HUTAN DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL
DI KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Magister

Program Studi
Magister Agribisnis

Disusun dan Diajukan Oleh:

FITRIANI K.

Nomor Induk Mahasiswa : 105051101221

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER AGRIBISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2023

TESIS

**Analisis Determinan Pendapatan Rumah Tangga Petani dalam
Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten
Gowa**

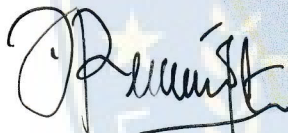
Yang disusun dan diajukan oleh

FITRIANI K
NIM. 10 50 511 01221

Telah dipertahankan di depan panitia Ujian Tesis
pada tanggal 10 Agustus 2023

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. Sri Mardiyati, S.P.,M.P.

Pembimbing II,



Dr. Ir. Muh. Arifin Fattah, M.Si.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Unismuh Makassar,

Ketua Program Studi
Magister Agribisnis,



Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.
NBM. 613 949



Dr. Mohammad Natsir, S.P., M.P
NBM. 733 238

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : Analisis Determinan Pendapatan Rumah Tangga
Petani dalam Program Perhutanan Sosial di
Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Fitriani K.

Nim : 10 50 511 01221

Program Studi : Magister Agribisnis

Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia penguji tesis pada tanggal 10 Agustus 2023, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agribisnis (M.P.) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Agustus 2023

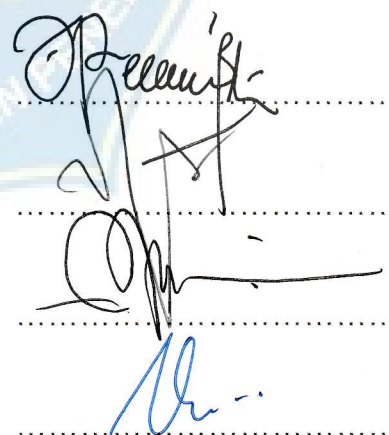
Tim Penguji

Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P.
(Pembimbing I)

Dr. Ir. Muh. Arifin Fattah, M.Si.
(Pembimbing II)

Dr. Ir. Irma Sribianti, S.Hut., M.P., IPM.
(Penguji I)

Dr. Mohammad Natsir, S.P., M.P.
(Penguji II)



Handwritten signatures of the examiners, including a blue signature at the bottom.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fitriani K.

Nim : 105051101221

Program Studi : Magister Agribisnis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2023



Fitriani K.

ABSTRAK

Fitriani K., 2023. Analisis Determinan Pendapatan Rumah Tangga Petani Hutan dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, dibimbing oleh Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P. dan Dr. Ir. Muh. Arifin Fattah, M.Si.

Penelitian ini bertujuan antara lain; (1) untuk menganalisis implementasi program perhutanan sosial; (2) untuk menganalisis tingkat pendapatan rumah tangga petani dalam program perhutanan sosial; dan (3) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani hutan dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian survei, sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari, yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan April 2023. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yakni memilih secara sengaja terhadap anggota kelompok tani hutan yang lebih aktif dalam program perhutanan sosial, sehingga diperoleh sampel sebanyak 30 petani responden. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, analisis pendapatan rumah tangga, dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, dilaksanakan dengan melibatkan anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari sebagai pelaku utama, dengan pendampingan dari instansi pemerintah. Implementasi program perhutanan sosial secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga petani hutan. Kontribusi pendapatan rumah tangga petani hutan meliputi: pendapatan usahatani tanaman hutan (getah pinus) sebesar 43 persen; pendapatan usahatani non tanaman hutan (tanaman kopi) sebesar 5,05 persen; usahatani padi sawah sebesar 37 persen; dan usahatani tanaman semusim lainnya sebesar 14,95 persen. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan rumah tangga petani hutan dalam program perhutanan sosial adalah pendapatan tanaman hutan, pendapatan non tanaman hutan, dan lama menjadi anggota kelompok tani hutan. Apabila pendapatan tanaman hutan bertambah satu persen maka pendapatan rumah tangga petani akan naik sebesar 0,5906 persen. Jika pendapatan usahatani non tanaman hutan naik satu persen maka pendapatan rumah tangga petani akan naik sebesar 0,4903 persen. Jika anggota kelompok tani hutan semakin aktif setiap tahun dalam program perhutanan sosial, maka pendapatan rumah tangga petani hutan akan naik sebesar 0,0427 persen.

Kata kunci : pendapatan, petani hutan, perhutanan sosial

ABSTRACT

Fitriani K., 2023. Determinant Analysis of Forest Farmer Household Income in the Social Forestry Program in the Buttonopao District, Gowa Regency, supervised by Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P. and Dr. Ir. Muh. Arifin Fattah, M.Sc.

This research aims to, among others; (1) to analyze the implementation of social forestry programs; (2) to analyze the income level of farmer households in social forestry programs; and (3) to analyze the factors affecting the household income of forest farmers in the social forestry program in Tombolopao District, Gowa Regency. The research design used is a survey research design, while the type of research is a type of quantitative and qualitative descriptive research. This research was carried out in Tombolopao District, Gowa Regency, South Sulawesi Province, at the Rimba Lestari Forest Farmer Group, which was carried out from March 2023 to April 2023. The sampling technique using *purposive sampling* is to deliberately select members of forest farmer groups who are more active in social forestry programs, resulting in a sample of 30 respondent farmers. The data collection method is carried out through questionnaires, observations, and interviews. Data analysis used quantitative descriptive analysis, household income analysis, and multiple linear regression analysis.

The results showed that the implementation of the social forestry program in Tombolopao District, Gowa Regency, was carried out by involving members of the Rimba Lestari Forest Farmer Group as the main actors, with assistance from government agencies. The implementation of social forestry programs in general has a positive impact on increasing the household income of forest farmers. The contribution of forest farmer household income includes: forest crop farm income (pine sap) of 43 percent; non-forest plantation farm income (coffee plant) of 5.05 percent; paddy rice farming by 37 percent; and farming other annuals by 14.95 percent. Factors that significantly affect the household income of forest farmers in social forestry programs are forest plant income, non-forest plant income, and long time as a member of a forest farmer group. If the income of forest crops increases by one percent, the income of farmer households will increase by 0.5906 percent. If the income of non-forest plantation farmers increases by one percent, the income of farmer households will increase by 0.4903 percent. If forest farmer group members become more active every year in social forestry programs, then the household income of forest farmers will increase by 0.0427 percent..

Keywords: income, forest farmers, social forestry

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena bimbingan dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyusun tesis yang berjudul “Analisis Determinan Pendapatan Rumah Tangga Petani Hutan Dalam Program Perhutanan Sosial Di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mencapai derajat Magister Agribisnis pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah.

Penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas bantuan dan peran dari Ibu Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P., sebagai pembimbing satu dan Bapak Dr. Ir. Muh. Arifin Fattah, M.Si., sebagai pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan mulai dari pemilihan judul sampai pada penulisan tesis ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	7
1. Konsep Perhutanan Sosial	7
2. Konsep Agroforestry	20
3. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	25
4. Konsep Usahatani	29
5. Pendapatan Rumah Tangga Petani	38
B. Kajian Penelitian yang Relevan	39
C. Kerangka Pemikiran	45
D. Hipotesis	48
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Desain dan Jenis Penelitian	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
C. Populasi dan Sampel	51
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian ..	54
F. Teknik Analisis Data	57
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Dekripsi Lokasi Penelitian	60

1. Letak Geografis	60
2. Luas Wilayah	61
3. Iklim dan Musim Kabupaten Gowa	62
4. Keadaan Penduduk	63
B. Organisasi Pemangku Kawasan Hutan Kabupaten Gowa .	66
1. Kelembagaan KPH Jeneberang	66
2. Unsur Organisasi KPH Jeneberang	68
3. Kedaan Aparat Sipil Negara KPH Jeneberang	70
C. Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Gowa.....	71
1. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya	71
2. Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Gowa	74
3. Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari	74
BAB V. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	78
B. Implementasi Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	85
C. Pendapatan Rumah Tangga Petani dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	90
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Petani Hutan dalam Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	93
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
Tabel 2.1.	Kajian Penelitian Yang Relevan	41
Tabel 4.1.	Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	63
Tabel 4.2.	Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Pos Pengamatan di Kabupaten Gowa	64
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	65
Tabel 4.4.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Berdasarkan Kelompok Umur	66
Tabel 4.5.	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah Kecamatan	67
Tabel 4.6.	Komposisi Aparat Sipil Negara Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang, Menurut Tingkat pendidikan	72
Tabel 4.7.	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Gowa Menurut Fungsinya	73
Tabel 4.8.	Blok Pengelolaan Kawasan Hutan Kewenangan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang	74
Tabel 5.1.	Distribusi Umur Petani Responden dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	79
Tabel 5.2.	Tingkat Pendidikan Anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	80
Tabel 5.3.	Pengalaman Berusahaatani Anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	82
Tabel 5.4.	Jumlah Tanggungan Keluarga Anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	83

Tabel 5.5. Lahan Garapan Anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	84
Tabel 5.6. Lamanya Bergabung Dalam Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	85
Tabel 5.7. Pendapatan Rumah Tangga Petani per hektar per tahun dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	93
Tabel 5.8. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Petani Hutan dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran Penelitian	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
Lampiran 1.	Identitas Reponden Petani dalam Program Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	104
Lampiran 2.	Pendapatan On Farm (Tanaman Hutan) dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	105
Lampiran 3.	Pendapatan On Farm (Tanaman Kopi) dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	106
Lampiran 4.	Pendapatan On Farm (Padi Sawah) dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	107
Lampiran 5.	Pendapatan On Farm dalam Program Perhutanan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	108
Lampiran 6.	Pendapatan On Farm, Off Farm, dan Non Farm dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa	109
Lampiran 7.	Variabel-variabel dalam Analisis Regresi Linier Berganda	110
Lampiran 8.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	111
Lampiran 9.	Kuisisioner Penelitian	112

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyongsong era pembangunan sektor kehutanan ke depan, pengembangan dan pengelolaan hutan lestari di seluruh fungsi kawasan hutan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Pengelolaan hutan lestari merupakan resultan dari pembangunan ekonomi (produksi), ekologi dan sosial. Produktifitas dan fungsi hutan berkembang secara seimbang, proporsional dan berkeadilan, yang pada akhirnya menjamin terhadap keberadaan hutan, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat yang berkeadilan, menjamin produk-produk hutan dan kehutanan, serta mengurangi konflik sosial yang muncul ke permukaan, melalui pengembangan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional. Salah satu kebijakan prioritas pembangunan kehutanan dapat diterapkan guna mewujudkan hal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi sumberdaya hutan dan permasalahan yang dihadapi adalah ketergantungan masyarakat sekitar kawasan hutan terhadap kawasan hutan.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa masyarakat berkewajiban ikut serta menjaga hutan dari pengrusakan, berperan aktif dalam rehabilitasi, turut berperan serta dalam pembangunan kehutanan dan pemerintah berkewajiban mendorong peran

serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan jenis flora dan faunanya dan hampir sebagian besar berpotensi untuk dikembangkan dan diusahakan. Komoditas pertanian memiliki karakteristik umum antara lain waktu panen musiman, mudah rusak, dan harga yang berfluktuasi. Bagi masyarakat yang beraktifitas di bidang pertanian, tentu saja ini merupakan suatu masalah. Untuk itu diperlukan solusi-solusi yang tepat dalam penanganan masalah tersebut.

Ruang lingkup pertanian terdiri dari lima sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kelima sektor ini banyak diupayakan dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat di daerah-daerah pedesaan terutama masyarakat yang bermukim di sekitar dan di dalam kawasan hutan (Soekartawi, 2005),.

Dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang beraktifitas di bidang pertanian, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mengupayakan peningkatan produksi hasil-hasil komoditi pertanian. Salah satu program yang sekarang ini sementara dijalankan adalah program agroforestry dalam bentuk perhutanan sosial, yang memadukan kelima unsur sektor pertanian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Perhutanan sosial merupakan program yang saat ini mejadi salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Republik Indonesia. Perhutanan sosial sendiri memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Program ini dilatarbelakangi karena pada saat sekarang pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki 2 (dua) agenda besar, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Agenda besar dari KLHK ini menjadi fokus utama dalam program-program yang akan dijalankan nantinya.

Program ini memiliki paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan mulai dari kota, melainkan pembangunan juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat pinggiran (masyarakat sekitar hutan). Program Perhutanan Sosial, merupakan program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman

pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Pelaku Perhutanan Sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Perhutanan Sosial, juga menggambarkan implementasi dari Nawacita ke enam, yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat serta daya saing di tingkat internasional, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara ditingkat ASEAN lainnya. Mewujudkan

masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga menjadi landasan dari program Perhutanan Sosial ini dilaksanakan. Program tersebut tentunya sangat diharapkan mampu membantu peningkatan produksi pertanian yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa merupakan salah satu kecamatan yang telah melaksanakan Program Perhutanan Sosial sejak Tahun 2017. Dimana di kecamatan tersebut terdapat kelompok pengelola Perhutanan Sosial dalam bentuk Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yaitu Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari. Dalam implementasi kegiatannya, anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari terlibat secara langsung dalam berbagai Program Perhutanan Sosial. Pelibatan masyarakat secara langsung dalam berbagai Program Perhutanan Sosial tersebut, dimaksud agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga dan melestarikan hutan yang ada disekitarnya sekaligus dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk lebih mencermati analisis determinan pendapatan rumah tangga petani hutan dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, maka penelitian ini dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana tingkat pendapatan rumah tangga petani dalam program

perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa?

3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani hutan dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.
2. Untuk menganalisis tingkat pendapatan rumah tangga petani dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani hutan dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan guna mendukung upaya perumusan kebijakan dan langkah-langkah terlaksananya Program Perhutanan Sosial secara efektif dengan hasil yang optimal.

2. Manfaat Empiris

Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang masalah yang sedang dikaji dan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti lain.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Perhutanan Sosial

Terdapat berbagai pendapat dalam menafsirkan istilah Perhutanan Sosial (*Social Forestry*) yang berkembang akhir-akhir ini. Ada yang menafsirkan sebagai paradigma, ada yang berpendapat sebagai pendekatan dan ada pula yang menafsirkan sebagai sistem/model manajemen dalam pengelolaan hutan.

Social Forestry is a forestry which aims at producing flows of production and recreation benefits for the community, melihat secara umum bahwa kegiatan kehutanan yang menjamin kelancaran manfaat produksi dan kesenangan kepada masyarakat, tanpa membedakan apakah itu di lahan milik publik (negara) maupun lahan perorangan (private land). Sementara itu, Tiwari (1983) mengartikan *Social Forestry has in principle the objective to meet the basic needs of the local population from the forest i.e., fuel, fodder, food, timber, income and environment*. Tiwari lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat lokal (Westoby, 1968),

Ada empat bentuk operasional daripada Social Forestry yaitu :
(1) *Participatory Forestry*, yang berarti sebagai kegiatan pengelolaan hutan yang dirancang dengan pengelolaan secara profesional dengan tingkat pengendalian yang tinggi terhadap kawasan (lahan) hutan, (2)

Village Forestry, yaitu pengelolaan sumber daya hutan dan pohon oleh tenaga yang tidak profesional (tidak terlatih) baik di lahan publik (negara) maupun di lahan perorangan, (3) *Communal or Community Forestry*, yaitu merupakan *Village Forestry* yang dikelola secara bersama oleh masyarakat dan (4) *Farmers's Forestry* yaitu : salah satu bentuk daripada *Village Forestry* yang tanggung jawab pengelolaan oleh para petani sendiri (Wiersum, 1984).

Perhutanan sosial merupakan suatu konsep yang tidak baru. Perhutanan sosial sudah ada pada berabad-abad di banyak negara eropa kontinental (Klose 1985) dan paruh pertama abad ini banyak negara-negara di bawah aturan kolonial (telah mempunyai pelayanan hutan yang terutama berfungsi membentuk perlindungan hutan dan membuat "area hutan desa" atau area kayu bakar perkotaan" (Nyasaland 1926-1963). Pada tiga puluh tahun terakhir, ide pengembangan melalui industrialisasi mengarah pada perubahan aktivitas pelayanan hutan yang menghasilkan konsentrasi pada perkebunan industri. Tidak terdapat sumber daya tersedia bagi kehutanan masyarakat baik oleh bantuan lembaga atau bahkan sebagian besar pemerintah nasional (Hardcastle, 1987).

Program perhutanan sosial di India merupakan salah satu eksperimen terbesar dan paling inovatif dalam kehutanan partisipasi dimana saja; dan juga salah satu intervensi terbesar yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan penggunaan lahan komunal.

Lebih lanjut dijelaskan, perhutanan sosial mempunyai asal usul formal di India dengan laporan Komisi Nasional Pertanian tahun 1976, yang merekomendasikan penanaman pohon pada lahan yang dapat diakses oleh masyarakat desa untuk mengurangi tekanan pada hutan yang dialokasikan untuk perhutanan produksi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat perdesaan untuk bahan bakar, penggembalaan dan hasil hutan lainnya (GOI). Ini dicapai dengan mendorong penanaman pohon oleh petani pada lahannya, dan penanaman blok pada berbagai kategori di lahan publik. Sejumlah pendekatan berbeda untuk mencapai yang pada akhirnya dikembangkan, yang hanya dirancang untuk membangun kayu bakar pada lahan komunal, yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat pengguna (Arnold, 1990).

Terdapat tiga elemen fundamental pada proyek perhutanan sosial: hutan, masyarakat dan pembentukan hubungan di antara keduanya. Suatu pemahaman yang komprehensif tentang hutan dan masyarakat, dan suatu strategi tepat untuk elemen ketiga, yaitu prasyarat untuk mempromosikan keberhasilan proyek perhutanan sosial. Hutan terdiri dari lahan dan dihubungkan dengan vegetasi. Lahan mempunyai suatu dimensi dan potensi pertumbuhan. Vegetasi pada lahan merupakan suatu produk ukuran lahan, potensi pertumbuhan, dan penggunaannya yang berlangsung dari waktu ke waktu. Hutan juga mempunyai karakteristik sosial, yaitu kepemilikan

pada lahan dan hak-hak untuk menggunakan produknya. Seperti kita akan lihat, tiap-tiap penggunaan memainkan suatu peran signifikan dalam program perhutanan sosial.

Elemen kedua, masyarakat harus dipertimbangkan dalam sejumlah cara. Pertama, apakah masyarakat berhubungan dengan individu, kelompok yang sedikit, atau kelompok suatu badan yang besar?. Jika yang terakhir, berapa besar kelompok badan tersebut dan apa posisinya secara ekonomi, perilaku sosial, kemampuan kelembagaan dan keterampilan teknis?. Bagaimana kondisi masyarakat saat ini dan masa lalu, penerimaannya pada hutan? Apa yang mereka harapkan dari hutan dan bagaimana mereka memilih untuk mengakses sumber daya hutan?. Akhirnya, apakah peranan masyarakat di luar-apakah mereka dalam posisi arus utama pasar atau dalam area terisolasi yang sedikit hubungan dengan dunia luar?.

Elemen ketiga, pembentukan hubungan antara hutan dan masyarakat, inilah yang memberikan kehidupan pada proyek perhutanan sosial. Hubungan yang mencakup keseluruhan spektrum dari kebutuhan teknologi untuk menjangkau lahan potensial, melalui keberlanjutan generasi produk hutan yang diinginkan oleh masyarakat lokal, hingga keadilan distribusi manfaat pada masyarakat (Banerjee 1993).

Menurut Stieglitz (1999), makna sosial dalam perhutanan sosial yaitu :

- a. Perhutanan “sosial” adalah sosial dalam pengertian berusaha untuk mencapai dampak pengembangan lokal dari output sumber daya hutan, mencakup penekanannya pada isu-isu kelayakan sosial yang muncul dalam keberlanjutan manajemen hutan secara ekologi, antara lain :
- 1) Melalui partisipasi langsung dengan berdampingan populasi perdesaan dalam output hutan.
 - 2) Melalui integrasi kepentingan penggunaan sumber daya yang berdampingan dengan populasi
 - 3) Melalui ekspansi kemungkinan berdampingan populasi (legal, ekonomi) untuk mencapai keberlanjutan, konservasi bentuk-bentuk penggunaan lahan sumber daya hutan
- b. Perhutanan “sosial” adalah sosial dalam pengertian menjadi terintegrasi secara sosial. Fungsi kunci dalam hubungannya dengan sumber daya hutan dan produksi hutan mencakup :
- 1) Monitoring dan kewenangan pembuatan keputusan.
 - 2) Manajemen dan pengukuran konservasi.
 - 3) Keahlian dan tugas-tugas pelayanan.
 - 4) Investasi dan hasil panen; Terdapat transfer atau pemberian kembali, dalam keseluruhan atau bagianbagian tertentu, pada masyarakat sipil, misalnya pada kelompok-kelompok pengguna, institusi manajemen sumber daya masyarakat dan LSM

pelayanan, bukannya terkonsentrasi ditangan lembaga pemerintah atau konsesi swasta.

- c. Perhutanan “sosial” adalah sosial dalam pengertian menjadi terkonfigurasi secara sosial, yaitu mampu beradaptasi, dinamik, tanggap pada konteks dan lingkungan sosial. Proyek perhutanan sosial mengambil berbagai bentuk tergantung pada lingkungan tertentu (politik, ekonomi, budaya, ekologi) dan tetap fleksibel sebab kreativitas sosial partisipasi kelompok-kelompok kepentingan membentuk membentuk manajemen hutan. Kelayakan sosial dan integrasi sosial sebagaimana diuraikan di atas, disamping, hanya akan datang ketika perhutanan sosial bereaksi secara fleksibel pada pengembangan konstelasi kepentingan baru, perubahan tekanan pada eksploitasi dan perubahan kerangka kerja.
- d. Akhirnya, Perhutanan “sosial” adalah sosial dalam pengertian bahwa perhutanan sosial berkontribusi pada perubahan sosial.
- 1) Manajemen hutan berorientasi partisipasi merupakan suatu area penting untuk implementasi konkrit pada proses perubahan: desentralisasi, keanekaragaman kelembagaan, dan sebagainya, dalam pengertian suatu renegotiasi kewenangan dan tugas bagi baik negara dan masyarakat sipil. Kegiatan perhutanan sosial selalu mempunyai dimensi politik. Kegiatan perhutanan sosial dapat menyediakan insentif penting untuk efektif, yaitu substantif, desentralisasi.

- 2) Perhutanan sosial selalu mencakup manajemen konflik dan harmonisasi dimensi kepentingan (antara pengguna sumber daya, negara dan sektor swasta, atau antara kelompok-kelompok pengguna berbeda). Hal ini disebabkan berkembangnya negosiasi dan proses persetujuan berbagai kelompok-kelompok kepentingan terhadap perubahan kondisi dan penyediaan dorongan untuk proses redistribusi yang berhubungan dengan akses dan kontrol terhadap sumber daya.
- 3) Disamping itu, perhutanan sosial mempunyai implikasi yang berhubungan dengan perubahan dalam lanskap kelembagaan masyarakat, yaitu partisipasi dalam manajemen sumber daya yang hanya dapat efektif secara ekologi jika berjalan searah dengan proses pengembangan lebih lanjut pengorganisasian dan kelembagaan manajemen yang tepat.

Perhutanan sosial mempunyai dimensi ekonomi; partisipasi dalam manajemen sumber daya hutan yang tidak berhenti dengan hutan. Agar relevan secara ekologi, perhutanan sosial harus bergema dalam struktur penjualan dan rantai produk; manajer baru harus membuat suatu tempat bagi mereka sendiri sebagai kekuatan baru dalam sistem manajemen secara keseluruhan.

Social forestry sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam

rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan. *Social forestry* merupakan kebijakan pembangunan kehutanan yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan yang berdaya saing, kelola kawasan dan kelembagaan yang berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada yaitu sumberdaya pemerintah, swasta dan masyarakat serta sumberdaya alam. Tujuan pengembangan social forestry adalah terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai pelaku dan atau mitra utama pengelola hutan guna meningkatkan kesejahteraannya dalam rangka pengelolaan hutan lestari (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2003).

Perhutanan sosial merupakan salah satu strategi untuk melibatkan partisipasi, sebagai bagian dari upaya penghijauan, dan menyediakan rehabilitasi hutan dan lahan umum yang terdegradasi, dengan menanam spesies seperti *Eucalyptus* spp, dan *Acacia* spp (Lawbuary, 2008).

Perhutanan sosial adalah penanaman pohon atau semak yang bertujuan untuk kesejahteraan dan perbaikan masyarakat lokal. Cabang kehutanan khusus ini mampu memastikan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial pada masyarakat. Dalam kenyataannya, hutan dapat dikelola dengan cara yang jauh lebih berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal daripada meminggirkannya. Penelitian

menemukan indikasi bahwa lebih banyak yang bisa dilakukan untuk membuat pengelolaan hutan berkelanjutan-pilihan secara ekonomi lebih menarik bagi masyarakat miskin lokal. Perubahan ekologi yang merugikan mempengaruhi masyarakat untuk pindah dari habitat yang tidak mendukung ke yang subur (Baig et al. 2008).

Perhutanan sosial telah dikembangkan dan diaplikasikan pada skala besar dan tetap luas selama tiga dekade terakhir di tropis negara-negara berkembang (khususnya India) dalam merespon degradasi lanskap dan deforestasi skala besar yang terutama muncul dari ekspansi populasi manusia. Tiga tujuan utama perhutanan sosial, yang dicatat oleh FAO (1978) menjadi :

- a. Penyediaan bahan bakar dan barang-barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pada rumah tangga perdesaan dan tingkat masyarakat.
- b. Penyediaan makanan dan kebutuhan stabilitas lingkungan untuk mempertahankan produksi makanan.
- c. Menghasilkan pendapatan dan tenaga kerja dalam komunitas (Robert dan Fing, 2010).

Selanjutnya dijelaskan bahwa pada perhutanan sosial, isu dasarnya adalah bukan masalah teknis tapi sosial dan ekonomi sebagai contoh:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan, pada cara-cara penting, peran pejabat teknis, administrator, penduduk desa di berbagai tingkat sosial.
- b. Mengintegrasikan pertumbuhan pohon pada penggunaan lahan, pelibatan interaksi di masyarakat dan tingkat lain antara kehutanan, pertanian dan spesialis dan praktisi peternakan.
- c. Mengetahui dan menyediakan secara efektif peran kehutanan dalam produksi dan keamanan makanan (de Montalambert 1987).

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. (PP. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Ps. 1 dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Ps.1).

Awal tahun 1970-an, Indonesia mulai mengadopsi sistem Social Forestry dari Eropa. Sistem ini melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di dalam kebijakan yang akan diterapkan. Kemunculan Social Forestry ini dilatarbelakangi oleh kegagalan dua sistem pengelolaan hutan

sebelumnya yang berimbas kepada tingkat deforestasi (kerusakan hutan) yang sangat tinggi serta kemiskinan masyarakat sekitar hutan sehingga pada sekitar tahun ini konflik sosial mulai muncul seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan contoh dari sistem Social Forestry tersebut (Hartono, 2015).

Pemerintah merevisi Undang-Undang Kehutanan Nomor 5 tahun 1967 menjadi Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 yang merupakan dasar skema perhutanan sosial di Indonesia. Di bawah skema perhutanan sosial ini, masyarakat setempat mendapatkan izin pengelolaan hutan namun kepemilikan tanah tetap berada di tangan negara. Skema perhutanan sosial meliputi HKm (hutan kemasyarakatan/community forest), HTR (hutan tanaman rakyat/ community plantation forest) dan HD (hutan desa/village forest). Skema lain yang menawarkan manfaat bagi masyarakat lokal atas kontribusinya terhadap pembangunan hutan adalah kemitraan (partnership between private forestry company and local community) dan PHBM (pengelolaan hutan bersama masyarakat/joint forest management), yang merupakan kerjasama antara perusahaan hutan negara dan masyarakat lokal (Siscawati et al. 2017).

Program *social forestry* dapat mengambil peran ke depan untuk mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengembangan *social forestry* dalam pengelolaan

hutan harus dapat membalikkan paradigma dari pendekatan yang bersifat *top down* menjadi *bottom up* atau pendekatan partisipatif dan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat. Strategi optimum pengembangan *social forestry* untuk masyarakat adalah pemberian kesempatan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi insentif pada efisiensi dan keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya, tanpa harus membagi-bagi dan menyerahkan kepemilikan areal hutan pada masyarakat pelaku ekonomi.

Strategi pokok pengembangan *social forestry* adalah :

- a. Kelola kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *social forestry* dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.
- b. Kelola kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan *social forestry* melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas SDM.
- c. usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha di areal kerja *social forestry* melalui kemitraan dengan pertimbangan hak dan tanggung jawab.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya,

keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Berdasarkan hal tersebut, maka hal ini menjadi kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberadayakan lahan hutan.

Tujuan dari program perhutanan sosial adalah memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang perhutanan sosial. Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Program ini memiliki berbagai skema yang memiliki inti yang masih sama. Skema yang diusung dalam program ini adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016).

2. Konsep Agroforestry

Agroforestry adalah sistem budidaya tanaman kehutanan yang dilakukan bersama dengan tanaman pertanian / peternakan. Tanaman kehutanan yang dimaksud adalah tanaman pepohonan, sedangkan tanaman pertanian berkaitan dengan tanaman semusim.

Pengertian agroforestry dapat dijelaskan secara lebih luas, yaitu penggabungan sistem budidaya kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Istilah agroforestry berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yakni "*agroforestry*". *Agro* yang berarti pertanian, sedangkan *forestry* berarti kehutanan.

Di Indonesia, sistem ini seringkali disebut dengan istilah "wanatani" yang merupakan gabungan dari kata "wana" dan "tani" yang berarti hutan tani. Pada prakteknya, agroforestry ialah suatu sistem pengelolaan lahan yang berguna untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan dan untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Selain pengertian agroforestry secara umum diatas, ada beberapa definisi lain yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Agroforestry adalah bentuk menumbuhkan dengan sengaja dan mengelola pohon bersama dengan tanaman pertanian dan atau pakan ternak dalam sebuah sistem dengan tujuan berkelanjutan secara ekologi, sosial dan ekonomi. Dengan sederhana, dapat dikatakan menanam pohon dalam sistem pertanian (Hudges, 2000).

- b. Agroforestry merupakan pemanfaatan tanaman kayu tahunan meliputi pepohonan, belukar, palem, atau bambu secara seksama pada unit pengelolaan lahan yang sama dan layak tanam. Kegiatan ini dilakukan dengan pengaturan ruang secara campuran atau lokasi yang sama secara berurutan dan berkelanjutan (Reinjntjes, 1999).
- c. Agroforestry ialah sistem pengelolaan lahan berkelanjutan dan mampu meningkatkan produksi lahan secara menyeluruh. Agroforestry merupakan kombinasi produksi tanaman pertanian dengan tanaman hutan dan atau hewan ternak secara bergiliran atau bersamaan pada bidang lahan sama dengan teknik pengelolaan praktis sesuai budaya setempat (K.F.S King dan M.T Chandler, 1979).
- d. Agroforestry sebagai istilah kolektif untuk sistem dan teknologi penggunaan lahan secara terencana pada unit lahan dengan mengkombinasikan tumbuhan berkayu seperti pohon, perdu, bambu dan palem dengan tanaman pertanian dan atau hewan ternak yang dilakukan pada waktu bersamaan atau bergiliran sehingga timbul interaksi ekologis dan ekonomis antar komponen (Lundgren dan Raintree, 1982).
- e. Agroforestry adalah sistem penggunaan lahan terpadu mencakup aspek sosial dan ekologi yang dilakukan melalui kombinasi pepohonan dengan tanaman pertanian dan atau hewan ternak

secara bersamaan atau bergiliran, sehingga dari satu unit lahan dapat tercapai hasil ganda dan optimal secara berkesinambungan (Naik PKR, 1933).

- f. Agroforestry adalah sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu atau bisa pula dengan rerumputan, ternak dan hewan lain sehingga tercipta interaksi ekologis dan ekonomis antar komponen (Huxley, 1999).

Konsep agroforestry merupakan rintisan dari tim Canadian International Development Centre yang melakukan kegiatan identifikasi prioritas pembangunan dalam bidang kehutanan di negara berkembang pada kisaran tahun 1970-an. Tim ini menyimpulkan jika hutan di kawasan berkembang belum cukup dimanfaatkan dan hanya terbatas pada aspek, yaitu:

- a. eksploitasi selektif hutan alam
- b. tanaman hutan secara terbatas

Oleh sebab itu, agroforestry diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan lahan dan mencegah perluasan lahan terdegradasi, melestarikan sumber daya hutan, meningkatkan mutu pertanian dan menyempurnakan intensifikasi serta diversifikasi silvikultur. Akan tetapi, jauh sebelum itu sistem agroforestry telah dilakukan oleh petani di Indonesia selama berabad-abad dengan istilah berbeda.

Dari pengertian agroforestry maka dapat disimpulkan jika sistem ini sangat bervariasi dan dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteris-kriteria sebagai berikut :

- a. Secara Struktural adalah berkaitan dengan komposisi komponen, seperti sistem agrisilvikultur, silvopastur, agrisilvopastur dan lainnya
- b. Secara Fungsional adalah terkait fungsi atau peranan utama suatu sistem, terutama komponen tanaman kayu
- c. Secara Sosial Ekonomis adalah berkaitan dengan tingkat masukan dalam suatu pengelolaan, meliputi masukan rendah atau tinggi, intensitas dan skala pengelolaan, tujuan usaha, sub sistem, komersial dan intermedier
- d. Secara Ekologis adalah menyangkut kondisi lingkungan dan kesesuaian ekologis penerapan sistem agrisilvikultur, silvopastur, agrisilvopastur dan lainnya

Dapat disimpulkan pula bahwa komponen utama agroforestry terdiri dari kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Agroforestry merupakan sistem penggunaan lahan berkelanjutan yang semakin mendapat perhatian di seluruh dunia karena peranannya secara ekologi, ekonomi dan sosial. Agroforestry mempunyai *tools* untuk merespon permasalahan dan tantangan penggunaan lahan yang semakin berat secara terintegrasi yaitu keamanan pangan, degradasi lahan, kemiskinan yang ekstrim, perubahan iklim, dan lain-lain (Nair dan Garrity, 2012).

Agroforestry adalah pendekatan yang komprehensif, menggabungkan pengetahuan tradisional petani berabad yang lalu dengan ilmu pengetahuan modern. Penggunaan lahan dimasa datang tidak lagi hanya sekedar lahan, tetapi juga tentang atmosfer, keragaman hayati, pangan, air dan energi (Steiner, 2012).

Di desa-desa sekitar hutan, praktek agroforestry kompleks telah menopang kehidupan masyarakat secara turun temurun, karena sistem penggunaan lahan ini mampu menyediakan pangan, papan, energy, pakan dan obat-obatan. Bentuk dan praktek agroforestry tradisional tersebut mempunyai keseimbangan dengan lingkungannya sehingga dapat berkelanjutan. Untuk meningkatkan dan menjamin keberlanjutan produksi pangan dan mata pencaharian masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lahan hutan, seyogianya aplikasi agroforestry di dalam kawasan hutan dilaksanakan selama daur tanaman hutan dengan memperbanyak komponen biotik penghasil pangan sehingga terbentuk agroforesti kompleks dan permanen berbasis pangan (de Foresta et al. 2000).

Keanekaragaman jenis dari agroforestry memberikan hasil yang terus menerus sepanjang tahun dan pada skala kecil hasil pekarangan dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga sendiri secara subsisten, namun pada skala tertentu hasil pekarangan dapat memberikan pendapatan tambahan bagi pemiliknya terutama bagi mereka yang menerapkan sistem pertanian terpadu (Arifin, 2003).

Penggunaan teknologi *agroforestry* dapat memberikan keuntungan/manfaat yang cukup besar bagi para pemilik lahan. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan penggunaan teknik *agroforestry* yaitu sebagai berikut :

- a. Keuntungan ekologis, yaitu penggunaan sumber daya yang efisien baik dalam pemanfaatan sinar matahari, air, dan unsur hara di dalam tanah.
- b. Keuntungan ekonomis, yaitu total produksi yang dihasilkan lebih tinggi sebagai akibat dari pemanfaatan yang efisien.
- c. Keuntungan sosial, yaitu memberikan kesempatan kerja sepanjang tahun.
- d. Keuntungan psikologis, yaitu perubahan yang relatif kecil terhadap cara berproduksi tradisional dan mudah diterima masyarakat dari pada teknik pertanian monokultur.
- e. Keuntungan politis, yaitu sebagai alat yang memberikan pelayanan sosial dan kondisi hidup yang lebih baik bagi petani.

3. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani juga dapat diartikan organisasi non formal di perdesaan yang

ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani”. (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007).

Umumnya kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan tujuan, kesamaan kepentingan dan kesamaan kondisi dalam suatu lingkungan petani. dengan dibentuknya kelompok tani mempermudah untuk penyampaian materi penyuluhan berupa pembinaan dalam memberdayakan petani agar memiliki kemandirian, bisa menerapkan inovasi ,dan mampu menganalisa usahatani, sehingga petani dan keluarganya bisa memperoleh pendapatan dan kesejahteraan yang meningkat dan layak.

Adanya kelompok tani bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar petani/ nelayan di dalam lingkungan organisasi kelompok tani ataupun pihak lain diluar kelompok tani. dengan kerjasama yang dibentuk diharapkan kelompok tani bisa lebih efisien serta lebih mampu menghadapi tantangan, hambatan, gangguan ataupun ancaman dalam usaha tani. bisa juga bertujuan sebagai wadah belajarnya para petani guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap baik itu pengurus ataupun anggotanya.

Kelompok tani minimal mempunyai kepengurusan dimulai dari ketua, sekretaris dan bendahara kelompok yang dipilih oleh masyarakat tani. kelompok tani harus diketahui dan disahkan oleh pihak pemerintah setempat baik tingkat desa atau kelurahan

setempat. Dalam aturan baru para pengurus kelompok tani wajib berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat (Ina, 2013).

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian mengemukakan bahwa Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk memonitor atau mengevaluasi kinerja kelompok tani. Kinerja tersebutlah yang akan menentukan tingkat kemampuan kelompok. Penilaian kinerja kelompok tani didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/OT.210/1992.

Pemberdayaan kelompok tani merupakan sebuah model pemberdayaan yang arah pembangunan berpihak pada rakyat. Kelompok tani pada dasarnya sebagai pelaku utama pembangunan di pedesaan. Kelompok tani dapat memainkan peran tunggal maupun ganda, seperti penyediaan input usaha tani, penyediaan air irigasi, penyediaan modal, penyediaan informasi, serta pemasaran hasil secara kolektif. Peran kelompok tani merupakan gambaran tentang kegiatan-kegiatan kelompok tani yang dikelola berdasarkan persetujuan anggotanya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berdasarkan jenis usaha, atau unsur-unsur subsistem agribisnis,

seperti pengadaan sarana produksi, pemasaran, dan sebagainya. Pemilihan kegiatan kelompok tani ini berdasarkan pada kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial ekonomi dan lain sebagainya.

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha. Kelompok tani sebagai pelaku utama menjadi salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan pertanian (Christina S. Parissing, 2021).

Ciri-ciri kelompok tani adalah :

- a. Saling mengenal, akrab, saling percaya diantara sesama anggota
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi, pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial.
- d. Ada pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Fungsi Kelompok Tani adalah :

- a. Kelas Belajar : merupakan tempat atau wadah belajar mengajar sesama anggota dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota untuk tumbuh dan berkembang dalam berusaha meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kehidupan yang sejahtera.

- b. Wahana kerjasama : merupakan tempat memperkuat kerjasama, baik antara sesama anggota kelompok tani pun juga sesama kelompok tani atau pihak lain, sehingga usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan.
- c. Unit Produksi : Usaha tani dari setiap anggota kelompok merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan tetap menjaga kualitas, kuantitas dan keberlanjutan atau kontinuitas produksi.

Pembinaan kelompok dilaksanakan secara berkesinambungan dan tetap diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, dengan harapan kelompok tani mampu mengembangkan usahatani dan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

4. Konsep Usahatani

Usahatani merupakan organisasi dari alam (lahan), tenaga kerja dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Organisasi tersebut ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai pengelolanya (Firdaus, 2009). Usahatani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, teknologi, pupuk, benih, pestisida) dengan efektif, efisien dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang

tinggi sehingga pendapatan usahataniya meningkat (Rahim dan Hastuti, 2007).

Setiap petani selalu menginginkan keuntungan dalam setiap usaha mereka. Baik itu usaha dari segi pertanian, perkebunan, maupun dari segi lainnya. Untuk memperoleh keuntungan yang tentu saja yang maksimal atau optimum para petani tentu saja ingin memproduksi produk (Q) yang mereka usahakan sebanyak mungkin. Namun, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal tentu saja bukan hanya dilihat dari segi jumlah produk yang di produksi namun juga dari harga jual dari produk tersebut. Dan tentu saja dengan menekan total biaya maka keuntungan yang diharapkan bisa tercapai.

Usahatani (*farm*) adalah organisasi dari alam (lahan), tenaga kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian, organisasi tersebut ketatalaksanaanya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai pengelolanya.

Dalam setiap usahatani tentu saja memerlukan faktor-faktor produksi karena tanpa adanya faktor produksi tentu saja kegiatan usahatani tidak dapat berjalan. Faktor-faktor produksi tersebut berupa:

a. SDA (Sumber Daya Alam)

Sumberdaya Alam atau lahan merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung suatu proses produksi dalam usaha pertanian. Dari luas lahan, tingkat kesuburan tanah

merupakan salah satu unsur pokok yang dibutuhkan dalam suatu lahan pertanian.

Semakin luas suatu lahan yang dimiliki oleh seorang petani maka akan semakin banyak produksi yang akan dihasilkan oleh petani tersebut. Namun, semakin kecil suatu lahan maka akan semakin sedikit produksi yang akan dihasilkan oleh petani tersebut. Menurut Suratiah (2006), sifat, letak dan tingkat kesuburan tanah merupakan faktor-faktor tanah yang juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan proses produksi suatu usahatani.

b. SDM (Sumber Daya Manusia)

Dalam hal ini yang dimaksud adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dalam usahatani memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan tenaga kerja dalam usaha di bidang lain yang bukan pertanian. Karakteristik itu berupa:

- 1) Keperluan terhadap tenaga kerja dalam usahatani tidak kontinyu dan tidak merata.
- 2) Penyerapan tenaga kerja dalam usahatani sangat terbatas.
- 3) Tidak mudah distandarkan, dirasionalkan dan dispesialisasikan.
- 4) Beraneka ragam coraknya dan kadangkala tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Tohir dalam Gracia, 2008).

Tenaga kerja dalam suatu usahatani kebanyakan berasal dari keluarga petani itu sendiri. Namun, sering juga mereka menggunakan tenaga kerja luar dimana untuk menggaji mereka

menggunakan istilah HOK. Dalam hal tenaga kerja keluarga sering dinyatakan bahwa orang yang bekerja itu tidak perlu dihitung biayanya padahal seharusnya meskipun menggunakan tenaga mereka sendiri ataupun menggunakan tenaga anggota keluarga mereka sendiri namun itu harus tetap dihitung.

c. Modal

Secara garis besar, modal dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1) Modal Abstrak – Konkrit

Modal abstrak atau *capital value* suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu adalah relatif permanen, sedangkan modal konkrit atau *capital goods* mengalami perubahan atau pergantian.

2) Modal Aktif – Pasif

Modal aktif adalah modal yang tertera disebelah debet dari neraca yang menggambarkan bentuk-bentuk dimana seluruh dana yang diperoleh perusahaan diutamakan. Sedangkan modal pasif adalah modal yang tertera disebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber dimana dana yang diperoleh.

d. Teknologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi), kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan

praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Secara etimologi, teknologi berasal dari kata *technologia* (bahasa Yunani) *techno* artinya 'keahlian' dan *logia* artinya 'pengetahuan'. Sementara secara umum, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia.

Definisi teknologi menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Capra, teknologi adalah pembahasan sistematis atas seni terapan atau petukangan. Hal ini sesuai dengan literatur Yunani yang mengacu pada kata *techne* yang artinya wacana seni.
- 2) Menurut Manuel Castells, pengertian teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan.
- 3) Menurut Gary J. Anglin, pengertian teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara sistematis serta mensistematis untuk memecahkan masalah manusia.

- 4) Menurut Jacques Ellil, pengertian teknologi ialah keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia.
- 5) Menurut Miarso, pengertian teknologi ialah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Hal itu juga menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang terkandung dalam sistem tertentu.
- 6) Menurut Poerbahawadja Harahap menjelaskan bahwa penggunaan kata teknologi pada dasarnya mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di dalam bidang teknik, serta mengacu pula pada ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik atau industri tertentu. Definisi ini tentu saja sangat mengacu pada definisi praktis dari teknologi, yang banyak ditemukan pada pabrik-pabrik dan juga industri tertentu.

Pada bidang kehutanan, penerapan teknologi diperlukan suatu langkah kolaboratif dan sistemik dalam meningkatkan daya saing kehutanan dari berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Riset dan Teknologi. Strategi penguatan sistem inovasi ke depan perlu diarahkan pada prioritas yang

mempertimbangkan tujuan pembaruan (*renewal*), pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest management*), dan peningkatan daya saing (*competitiveness*).

BPPT sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam mengkaji dan menerapkan teknologi di berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang kehutanan, telah melakukan beberapa inovasi sebagai bentuk kontribusi dalam mendorong inovasi pengelolaan hutan. Diantaranya yaitu inovasi teknologi budidaya tanaman hutan seperti produksi bibit untuk industri bibit tanaman kehutanan *fast growing species*, produksi Bibit Tumbuh Mandiri (BITUMAN) untuk jenis jenis tanaman reboisasi dan reklamasi lahan atau hutan. Selain itu juga BPPT telah melakukan perbanyakan tanaman secara in-vitro (kultur jaringan) dan ex-vitro untuk tanaman hutan industri, reboisasi dan konservasi seperti Eucalyptus, Acacia, Sengon, Kayu Besi, Meranti, Jati, Jabon, Trembesi, Gaharu serta Ebony.

Selain itu, diperlukan pula peran masyarakat untuk dapat ikut serta dalam upaya mengelola hutan. Inovasi teknologi yang dapat dilakukan dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan diantaranya melalui *agroforestry* teknologi yaitu pengelolaan hutan lestari dengan kombinasi hutan, pertanian, peternakan dan perikanan untuk menghasilkan pendapatan masyarakat jangka pendek, menengah dan panjang, serta melakukan pendidikan dan

pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan emisi karbon akibat REDD (*Reducing Emission for Deforestation and Forest Degradation*).

e. Manajemen

Manajemen agribisnis pada prinsipnya adalah penerapan manajemen dalam agribisnis. Oleh karena itu, seseorang yang hendak terjun di bidang agribisnis harus memahami konsep-konsep manajemen dalam agribisnis, yang meliputi pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, tingkatan manajemen, prinsip-prinsip manajemen dan bidang-bidang manajemen. Di dalam agribisnis ini ada keterkaitan dengan beberapa ilmu lain yaitu berupa ilmu pertanian dalam pengambilan keputusan (Firdaus. M, 2009).

Manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan bantuan manusia dan sumber-sumber daya lainnya (George R. Terry dalam Firdaus M., 2009).

Menurut James A.F Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian dan pengawasan anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang didalamnya terdapat beberapa faktor penting yaitu berupa; perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengawasan dimana hal ini dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Petani sebagai pengelola dan sekaligus manajer dalam usahatani melakukan beberapa aktivitas manajerial, seperti :

a) Aktivitas teknis

Aktivitas ini meliputi keputusan petani sebagai pengelola usahatani tersebut mengenai jenis tanaman apa yang akan diproduksi, jumlah skala usaha, teknologi yang digunakan dan tingkat penggunaan lahan.

b) Aktivitas komersial

Aktivitas ini meliputi perhitungan-perhitungan penggunaan faktor produksi yang dibutuhkan, sumber input yang akan digunakan, tempat pemasaran hasil produksi, keputusan-keputusan yang diambil baik dari segi penggunaan kombinasi input-input pertanian maupun kombinasi cabang usahatani.

c) Aktivitas finansial

Aktivitas ini merupakan perhitungan, ekspresi dan peramalan dari petani tersebut mengenai modal yang dibutuhkan dan sumber modal jangka pendek hingga jangka panjang, beserta perhitungan resiko-resikonya.

d) Aktivitas akuntansi

Aktivitas ini merupakan aktivitas pembuatan catatan atau laporan keuangan yang telah dilakukan dalam usahatani, yang bermanfaat sebagai alat kontrol dan kebutuhan peramalan untuk bisnisnya dimasa mendatang (Suratiah dalam Gracia, 2008).

Dengan istilah usahatani diatas telah mencakup pengertian yang luas, dari bentuk yang paling sederhana sampai yang paling moderen.

5. Pendapatan Rumah Tangga Petani

Pendapatan rumah tangga tani yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha tani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usaha tani. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan biaya produksi (input) yang dihitung dalam per bulan, per tahun, per musim tanam.

Pendapatan rumah tangga adalah seluruh penghasilan atau penerimaan berupa uang atau barang dari semua anggota rumah tangga yang diperoleh, baik yang berupa upah/gaji, pendapatan dari usaha rumah tangga, pendapatan lainnya, dan pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer). Dengan kata lain, pendapatan rumah tangga merupakan balas jasa faktor produksi tenaga kerja, balas jasa kapital, maupun pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer). Sumber pendapatan rumah tangga digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu pendapatan sektor pertanian dan non pertanian (Badan Pusat Statistik, 2014).

Sumber pendapatan dari sektor pertanian terdiri atas pendapatan dari usaha tani, ternak, buruh petani, menyewakan lahan, dan bagi hasil. Sumber pendapatan dari sektor nonpertanian dibedakan menjadi pendapatan dari industri rumah tangga, perdagangan, pegawai, jasa, buruh nonpertanian serta buruh subsektor pertanian lainnya (Sajogyo, 1990).

Pendapatan rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan ekonomi secara langsung, di samping pangsa pengeluaran pangan, nilai tukar petani, kemiskinan, dan kecukupan kalori (Purwoto et al., 2011).

Analisis pendapatan rumah tangga ditujukan untuk memahami besarnya tingkat pendapatan rumah tangga, distribusi pendapatan rumah tangga, dan struktur pendapatan rumah tangga. Peningkatan pendapatan rumah tangga antarwaktu dapat digunakan sebagai indikator meningkatnya daya beli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya. Analisis struktur pendapatan rumah tangga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar lapangan kerja dan usaha pertanian mampu berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dampak perhutanan sosial terhadap pendapatan rumah tangga tani, antara lain :

Tabel 2.1. Kajian Penelitian yang Relevan

No.	Judul / Peneliti	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Peranan Program Perhutanan Sosial Terhadap Tingkat Pendapatan Petani (Studi Kasus di Desa Sidoharjo, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Wilayah KPH Kedu Utara) / Siti Muksidah, 1997	Statistik yang menggunakan prosedur eliminasi langkah mundur (persamaan regresi)	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh sumbangan pendapatan dari lahan andil terhadap seluruh sumber pendapatan pesanggem: (i) strata I, lahan andil memberikan kontribusi Rp 42.100,00/bulan; (ii) strata II, memberikan kontribusi Rp 65.100,00/bulan; (iii) strata EI, kontribusinya sebesar Rp 41.875,00/bulan; (iv) strata IV, kontribusinya sebesar Rp 10.700,00/bulan. Dari hasil pengolahan data dengan statistik yang menggunakan prosedur eliminasi langkah mundur dihasilkan persamaan regresi : $Y = 35805,4662 + 223,3316X3 - 0,0175X6$ dimana variabel tak bergantung yang berpengaruh nyata terhadap variabel bergantung adalah curahan jam kerja pada lahan andil (X3) dan pendapatan petani dari luar lahan andil (X6).
2	Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri) / Ni Putu Sekar T. Laksemi, dkk, 2018	Metode Analisis Hierarchy Process (AHP)	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tiga prinsip utama untuk mengevaluasi pengelolaan Hutan Desa Wanagiri yaitu prinsip lingkungan berkelanjutan (aspek lingkungan), peningkatan kesejahteraan masyarakat (aspek sosial-ekonomi), dan perbaikan tata kelola hutan (aspek kelembagaan). Berdasarkan hasil AHP dari ketiga prinsip

			tersebut diperoleh tingkat keberlanjutan pengelolaan Hutan Desa Wanagiri pada aspek lingkungan yaitu 49,9%, pada aspek sosial-ekonomi yaitu 62,7%, dan pada aspek kelembagaan yaitu 51%. Secara keseluruhan, tingkat keberlanjutan pengelolaan Hutan Desa Wanagiri yaitu sebesar 54,4% dan tergolong dalam predikat 'cukup untuk bisa dilaksanakan secara berkelanjutan'..
3	Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Aspek Ekonomi Di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut / Dinda permatasari, dkk, 2019	Metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program perhutanan sosial ini mampu berkontribusi meningkatkan peluang usaha dan pekerjaan di Desa Tebing Siring, terdapat peningkatan pendapatan anggota KT HKm ingin maju dalam setiap bulannya yang awalnya Rp. 415.200 di tahun 2011 menjadi Rp.1.125.000 di tahun 2019.
4	Peranan Perhutanan Sosial terhadap Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Proyek Penanaman di Desa Nanasi Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow / Gabby Y. Rondonuwu, dkk., 2020	Analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar pendapatan yang diperoleh oleh peserta proyek memiliki nilai rata-rata Rp.2 500 000 yang lebih kecil dari hasil pendapatan utama yang memiliki rata-rata Rp.3 463.333. Jumlah pendapatan yang diperoleh peserta proyek lebih kecil dari pendapatan sebelumnya. Pendapatan yang diperoleh dari proyek lebih cepat didapatkan sehingga bisa menjadi modal, biaya sekolah, biaya makan dan/atau untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

5	<p>Peranan Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Hutan Desa Kalimendong Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo / Avionita Wirasanti, dkk, 2020</p>	<p>Analisis deskriptif kuantitatif dan analisis data statistik</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam program PHBM yang terbagi menjadi 4 tahap yaitu partisipasi masyarakat desa hutan dalam tahap perencanaan, partisipasi masyarakat desa hutan dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat desa hutan dalam tahap pemanfaatan, dan partisipasi masyarakat desa hutan dalam tahap memberikan tanggapan/saran dan evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut masuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata nilai persentase sebesar 65,47%. Hal tersebut dipengaruhi oleh sistem pembinaan dari pihak Perhutani yang sering melibatkan petani peserta program PHBM dalam kegiatan yang dilakukan. 2) Tingkat pendapatan masyarakat petani peserta program PHBM masuk dalam kategori sedang dengan rata-rata nilai persentase sebesar 31.06%. Hal tersebut dipengaruhi oleh luas lahan yang dimiliki oleh petani peserta PHBM yang masih tergolong sempit yaitu kurang dari 0,5 ha. 3) Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat dalam program PHBM dengan peningkatan pendapatan masyarakat.</p>
6	<p>Karakteristik Sosial Ekonomi Yang</p>	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian karakteristik sosial ekonomi secara simultan (Uji F)</p>

	Berpengaruh Terhadap Pendapatan Kelompok Hutan Kemasyarakatan Panca Tunggal / Prila Idayanti, dkk.		berpengaruh sangat nyata terhadap pendapatan kelompok HKm Panca Tunggal. Secara Uji T, variabel yang berpengaruh nyata yaitu variabel jenis tanaman, status keanggotaan HKm, tingkat pendidikan, dan luas garapan lahan marga. Besarnya pengaruh masing-masing variabel memberikan pengaruh yang positif dengan jumlah yang berbeda-beda.
7	Profil Struktur Pendapatan Petani Hutan Kemasyarakatan Giri Madia Kabupaten Lombok Barat / Eilham Hutomo Santoso, dkk, 2022	Meode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani HKm Giri Madia memperoleh pendapatan yaitu sebesar Rp. 36.991.786/ orang/tahun. Struktur pendapatan petani yang diperoleh dari luar maupun dalam usahatani HKm masing-masing sebesar 66% dan 34%. Jenis pekerjaan yang memberikan pendapatan terbanyak berasal dari luar usahatani HKm secara berurutan yaitu jenis pekerjaan sebagai petani, guru, kepala dusun, wiraswasta, karyawan swasta, buruh dan peternak. Strategi yang dapat dikembangkan adalah strategi pengembangan agresif, strategi yang dapat diterapkan diantaranya; 1) memperkuat sumber daya manusia, 2) penyuluhan dan pelatihan terkait pencegahan hama dan penyakit tanaman, 3) penetapan kualitas produk, 4) membuka akses pasar, 5) pengadaan fasilitas alat, 6) pengembangan kerjasama.

9	<p>Status dan Determinan Pendapatan Petani Agroforestry di Lingkungan Taman Nasional Gunung Ciremai/ Suyadi, dkk</p>	<p>Metode statistik deskriptif dan statistik inferensial regresi.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan petani Agroforestry di lingkungan TNGC masih rendah. Penghasilan petani dari hasil usaha tani Agroforestry dan dari usaha lainnya kurang memadai sehingga kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari petani beserta keluarganya. Penghasilan rata-rata petani dari hasil usaha tani Agroforestry tidak lebih dari Rp725.000 per bulan. Penghasilan rata-rata petani dari buruh, dagang, atau ternak dan ojek tidak lebih dari Rp750.000 per bulan. Rendahnya tingkat pendapatan petani Agroforestry di lingkungan TNGC dipengaruhi oleh faktor sempitnya lahan yang dikelola petani untuk usaha tani Agroforestry. Faktor berikutnya adalah rendahnya kompetensi penyuluh kehutanan, lemahnya intensitas penyuluhan kehutanan, lemahnya peran KTH, dan rendahnya kapasitas petani Agroforestry di lingkungan TNGC.</p>
10	<p>Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Peserta Program Perhutanan Sosial dan Kelestarian Hutan di KPH</p>	<p>Metode kombinasi melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif</p>	<p>Hasil yang diperoleh yaitu (1) IPHPS memberikan kontribusi rata-rata yang cukup besar yaitu 46,42% dari total pendapatan rumah tangga petani. Tingkat kesejahteraan petani diukur dengan garis kemiskinan : 70% anggota masuk kategori miskin dan 30% tidak miskin. Potensi pendapatan dari penanaman</p>

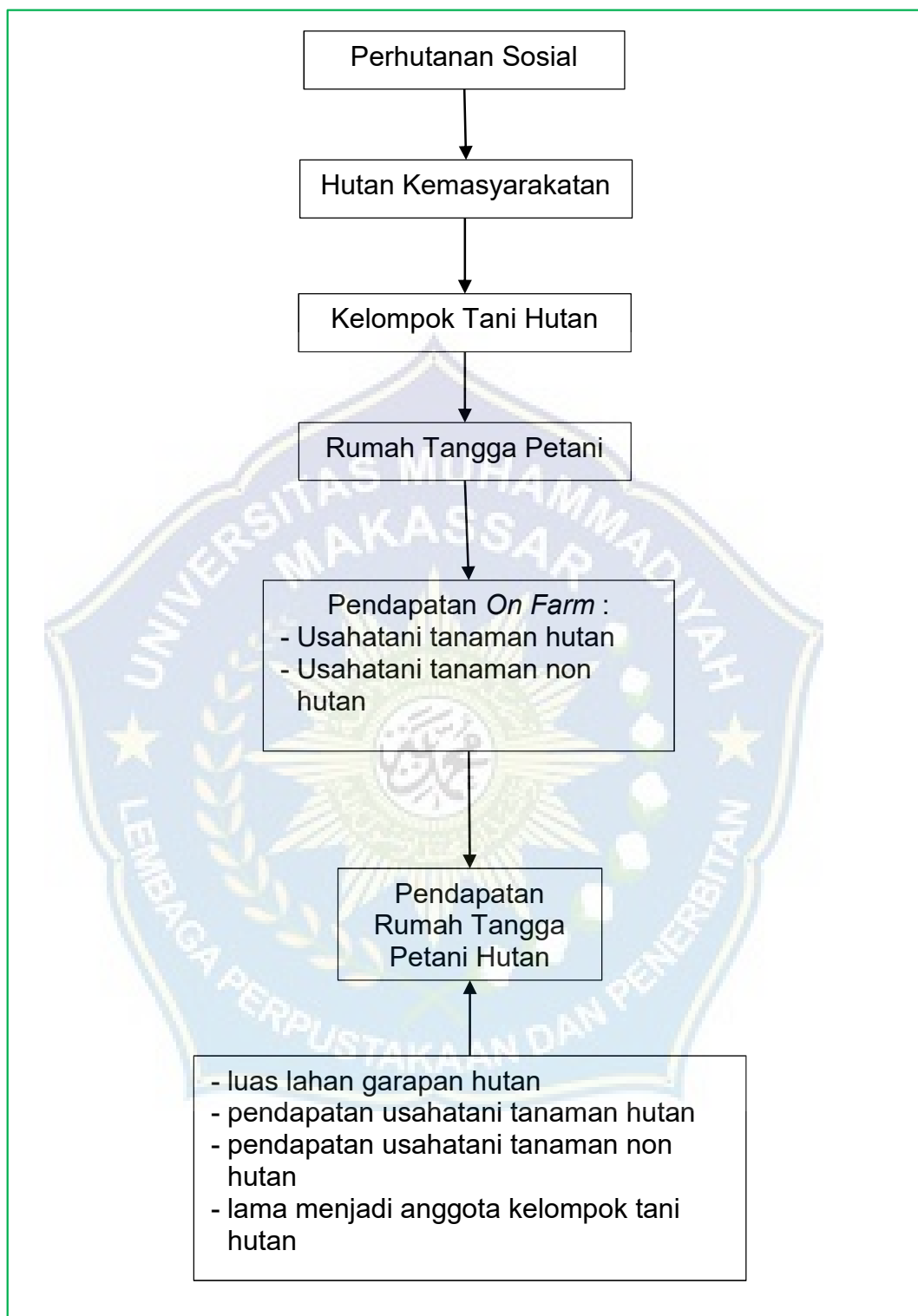
	Pemalang / Sulistyو Wibowo, 2022	jati memberikan kontribusi pendapatan per kapita per bulan Rp 57.017, sehingga terjadi penurunan angka kemiskinan dari semula 70% anggota dalam kategori miskin dan 30% tidak miskin, setelah Program IPHPS menjadi 47% anggota KTH yang dikategorikan miskin dan 53% tidak miskin; (2) Dampak terhadap kelestarian hutan yaitu terdapat upaya memperbaiki tutupan hutan yaitu dengan adanya penambahan penutupan lahan hutan tanaman jati seluas ± 45 ha atau sekitar 15% dari seluruh areal IPHPS. Kinerja pengelolaan hutan terdapat upaya perbaikan dalam aspek ekologi, sosial dn ekonomi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek.
--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Sasaran utama dari penelitian ini adalah hasil dari analisis determinan pendapatan rumah tangga petani hutan kemasyarakatan dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Adapun tahapan yang dilakukan dalam menganalisis dampak perhutanan sosial terhadap pendapatan rumah tangga tani anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Mengamati implemetasi Program Perhutanan Sosial pada Kelompok Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.
2. Menganalisis tingkat pendapatan rumah tangga tani sebelum dan sesudah program perhutanan sosial pada Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.
3. Menganalisis dampak yang ditimbulkan Program Perhutanan Sosial terhadap pendapatan rumah tangga tani pada Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.

Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir penelitian tentang dampak perhutanan sosial terhadap pendapatan rumah tangga tani pada Kelompok Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari Di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa diduga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga petani hutan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa adalah luas lahan garapan, pendapatan usahatani tanaman hutan, pendapatan usahatani tanaman non hutan, dan lama menjadi anggota kelompok tani hutan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka dalam melaksanakan penelitian ini dipergunakan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ada. Melalui metode penelitian yang tepat tentunya akan dapat memudahkan dan membantu dalam memperoleh data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan pemilihan metode penelitian yang keliru dikhawatirkan data yang diperoleh akan kurang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian.

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, misalnya dengan menguji kebenaran serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu (Surachmad, 1990).

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid, reliable dengan tujuan, dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 1994).

A. Desain dan Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari

adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Kerlinger, 1973).

Penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang (responden) tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu obyek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Metode Penelitian survei berkenan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri (Neuman W. Lawrence, 2003).

Semua anggota sampel atau responden dalam penelitian survei menjawab pertanyaan yang sama. Penelitian survei mengukur nilai beberapa variabel, menguji beberapa hipotesis tentang perilaku, pengalaman dan karakteristi suatu obyek. Penelitian survei pada umumnya adalah penelitian korelasi.

Penelitian survei dilakukan untuk mengambil sebuah generalisasi dari pengamatan yang tidak terlalu mendalam. Walaupun tidak seperti pada metode eksperimen yang memerlukan kelompok kontrol, generalisasi pada penelitian survei yang dilakukan dapat lebih akurat bila digunakan pada sampel yang mewakili (David Kline, 1980).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik,

perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuisisioner) dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan obyektif guna menjelaskan permasalahan tentang dampak perhutanan sosial terhadap pendapatan rumah tangga tani pada Kelompok Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada Kelompok Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari, dengan pertimbangan bahwa di kecamatan tersebut terdapat Program Perhutanan Sosial. Sedangkan waktu penelitian adalah selama 2 (dua) bulan yaitu mulai Bulan Maret 2023 sampai dengan Bulan April 2023.

C. Populasi dan Sampel

Istilah populasi dan sampel lebih tepat digunakan apabila penelitian yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Akan tetapi jika sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, akan lebih tepat digunakan istilah subjek penelitian.

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto (1993), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dengan demikian, maka populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan anggota Kelompok Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari yang ada di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 94 Kepala Keluarga.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu, sampel diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili (Sugiono, 2016).

Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara:

- a. Menentukan Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yang dijadikan tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa di kecamatan tersebut terdapat Program Perhutanan Sosial.

- b. Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yang menjadi anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari dengan pertimbangan bahwa kelompok tani dimaksud adalah salah satu kelompok tani pengelola izin program perhutanan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni memilih dengan sengaja terhadap anggota yang aktif dalam kegiatan kelompok tani hutan. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 petani hutan.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari telaah dokumen, yaitu berupa kegiatan mengamati dokumen-dokumen pada lokus penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan data primer diperoleh dari :

1. Kuesioner, yaitu berupa daftar pertanyaan yang mengacu pada variabel penelitian berikut indikator-indikatornya dan dibagikan kepada seluruh responden, antara lain : identitas petani (umur, pendidikan, pengalaman berusahatani dan jenis kelamin), faktor produksi dan sumber pendapatan rumah tangga.
2. Observasi, yaitu melakukan penelitian langsung pada objek sasaran penelitian untuk melihat langsung aktivitas di lapangan.

3. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara mendalam kepada informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam permasalahan penelitian, yaitu penyuluh kehutanan pendamping.

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup beberapa istilah sebagai berikut :

1. Dampak adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang.
2. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.
3. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Determinan matriks A ditulis dengan tanda $\det(A)$, $\det A$, atau $|A|$. Determinan dapat dianggap sebagai faktor penskalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks.
4. Pendapatan Rumah tangga petani yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha tani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usaha tani. Pendapatan usaha tani adalah selisih

antara pendapatan kotor (output) dan biaya produksi (input) yang dihitung dalam per bulan, per tahun, per musim tanam

5. Pendapatan on farm adalah suatu pendapatan yang didapatkan dari masyarakat yang melakukan usahatani di lahan kering dan lahan sawah. Pendapatan on farm terdiri atas pendapatan dari usahatani padi, jagung, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.
6. Rumah tangga adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada didalamnya.
7. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam

rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan

10. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
11. Agroforestry adalah sistem budidaya tanaman kehutanan yang dilakukan bersama dengan tanaman pertanian / peternakan. Tanaman kehutanan yang dimaksud adalah tanaman pepohonan, sedangkan tanaman pertanian berkaitan dengan tanaman semusim.
12. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha.
13. Kelompok Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari adalah penduduk atau masyarakat Kecamatan Tombolopao yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan memanfaatkan hutan sebagai sumber penghasilan mereka yang telah mendapatkan izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
14. Lahan Garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.
15. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Penyuluhan adalah bentuk usaha pendidikan non-formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan perbaikan kesejahteraan.

17. Implementasi adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Proses ini dapat dilakukan oleh manusia, mesin, atau alam menggunakan berbagai sumber daya yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dimaksudkan untuk membahas dan menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan, ditabulasi dan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan tidak bebas, baik secara parsial maupun serempak terhadap faktor faktor yang mempengaruhi dampak perhutanan sosial terhadap pendapatan rumah tangga tani pada Kelompok Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Untuk menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu mendapatkan informasi

mengenai rencana kerja kelompok tani, luas areal usahatani, sumberdaya manusia petani, modal usaha tani, teknologi usaha tani, manajemen usahatani, dan intensitas penyuluhan yang mendukung program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, dianalisis secara deskriptif.

1. Analisis Pendapatan Rumah Tangga

Analisis pendapatan rumah tangga petani hutan dianalisis menggunakan analisis persamaan pendapatan rumah tangga sebagai berikut (Sari et al., 2014):

$$P_{rt} = P_1 + P_2$$

Keterangan:

P_{rt} = Pendapatan rumah tangga

P_1 = Pendapatan *on farm* (usahatani tanaman hutan)

P_2 = Pendapatan *on farm* (usahatani tanaman non hutan)

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani hutan maka digunakan analisis regresi linier berganda seperti persamaan berikut :

$$\ln Y = \alpha + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 \ln X_4 + e$$

Keterangan:

Y = pendapatan rumah tangga tani (Rp)

α = intercept

β_1 - β_4 = koefisien regresi (parameter estimasi)

X1 = luas lahan garapan hutan (ha)

X2 = pendapatan usahatani tanaman hutan (Rp)

X3 = pendapatan usahatani tanaman non hutan (Rp)

X4 = lama menjadi anggota kelompok tani hutan (tahun)

e = error term

Dengan Y adalah variabel bebas, dan X adalah variabel-variabel bebas, a adalah konstanta (intersept) dan b adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas.

Analisis regresi linear berganda memerlukan pengujian secara serempak dengan menggunakan F hitung. Signifikansi ditentukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel atau melihat signifikansi pada output EVIEWS. Dalam beberapa kasus dapat terjadi bahwa secara simultan (serempak) beberapa variabel mempunyai pengaruh yang signifikan, tetapi tidak secara parsial. Langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah: 1) koefisien determinasi; 2) Uji F dan 3) uji t.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kedudukan Kabupaten Gowa terletak antara koordinat 119.3773° sampai 120.0317° Bujur Timur, dan 5.0829342862° sampai 5.577305437° Lintang Selatan, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, dan Kota Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Jeneponto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar

Kecamatan Tombolopao merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Gowa. Kecamatan Tombolopao yang beribukota di Tamaona, memiliki luas area $251,82 \text{ Km}^2$ atau sekitar 13,37% dari luas Kabupaten Gowa.

Desa Erelembang merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Desa Erelembang memiliki luas area $51,09 \text{ Km}^2$ atau sekitar 20,29% dari luas

keseluruhan Kecamatan Tombolopao, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pao
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tinggimoncong
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros

Kondisi geografis (topografi) Desa Erelembang, sebagian besar merupakan kawasan puncak dan lereng pegunungan. Desa Erelembang berjarak sekitar 7 Km dari ibukota Kecamatan Tombolopao dan 79,5 Km dari Sungguminasa yang merupakan Ibukota Kabupaten Gowa.

2. Luas Wilayah

Secara administratif Kecamatan Tombolopao merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam lingkungan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah 251,82 Km² yang terbagi menjadi 9 desa. Sebagian besar wilayah Kecamatan Tombolopao merupakan dataran tinggi yaitu : Desa Kanreapia, Desa Balassuka, Desa Tabbinjai, Desa Mamampang, Desa Tonasa, Desa Tamaona, Desa Pao, Desa Erelembang, dan Desa Bolaromang. Untuk lebih jelasnya luas masing-masing desa yang ada di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
1.	Kanreapia	25,83	10,26
2.	Balassuka	29,00	11,52
3.	Tabbinjai	24,35	9,67
4.	Mamampang	21,55	8,56
5.	Tonasa	42,00	16,68
6.	Tamaona	12,38	4,92
7.	Pao	24,62	9,78
8.	Erelembang	51,09	20,29
9.	Bolaromang	21,00	8,34
Jumlah		251,82	100,00

Sumber : *Gowa Dalam Angka Tahun 2021*

3. Iklim dan Musim Kabupaten Gowa

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim yaitu ; musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga Bulan September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Bulan Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April – Bulan Mei dan Bulan Oktober – Bulan Nopember, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Pos Pengamatan di Kabupaten Gowa

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	467,60	19	76,41
2	Februari	700,30	24	53,06
3	Maret	351,50	19	68,95
4	April	78,80	15	79,00
5	Mei	249,90	13	76,53
6	Juni	70,60	9	88,25
7	Juli	52,30	6	89,03
8	Agustus	14,80	4	100,00
9	September	22,00	5	100,00
10	Oktober	156,50	6	100,00
11	Nopember	91,60	19	80,54
12	Desember	826,20	26	31,65

Sumber : *Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofosika Kab. Gowa, 2021*

4. Keadaan Penduduk

Hasil pendataan penduduk Tahun 2021 jumlah penduduk Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa sebanyak 29.779 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 1,05.

Jika dilihat dari besarnya jumlah penduduk pada tiap desa/kelurahan di Kecamatan Tombolopao, maka jumlah penduduk lebih banyak berdomisili di Desa Tonasa. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk pada tiap desa/kelurahan di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Ribu)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Parempuan	Jumlah	
1.	Kanreapia	2.593	2.379	4.972	1,09
2.	Balassuka	1.583	1.479	3.062	1,07
3.	Tabbinjai	1.500	1.437	2.937	1,04
4.	Mamampang	1.213	1.203	2.416	1,01
5.	Tonasa	2.564	2.476	5.040	1,04
6.	Tamaona	1.872	1.862	3.734	1,01
7.	Pao	1.189	1.161	2.350	1,02
8.	Erelembang	2.172	2.056	4.228	1,06
9.	Bolaromang	538	502	1.040	1,07
	Jumlah	15.224	14.555	29.779	1,05

Sumber : Gowa Dalam Angka Tahun 2021

Jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Erelembang adalah sekitar 4.228 jiwa dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.172 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.056 jiwa, dan rasio jenis kelamin sebesar 1,06.

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan kelompok umur dilihat dari struktur umur penduduk menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Gowa didominasi oleh penduduk usia muda yaitu usia 20 - 24 tahun, dan yang terendah yaitu pada kelompok usia 70 – 74 tahun, sebagaimana dapat dilihat dari Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0 – 14	4.033	3.952	7.985
2.	15 – 64	10.152	9.645	19.797
3.	65 +	1.039	958	1.997
Jumlah		15.224	14.555	29.779

Sumber : Gowa Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.4 mendeskripsikan bahwa distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk usia produktif antara 15-64 tahun pada Tahun 2020 sebanyak 19.797 jiwa. Kelompok umur ini dapat memberikan gambaran tentang potensi tenaga kerja produktif yang mempunyai peranan besar dalam perkembangan perekonomian di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.

Angka kepadatan penduduk untuk masing-masing desa/kelurahan di Kecamatan Tombolopao sangat bervariasi mulai dari 50 jiwa per km² sampai 302 jiwa per km² atau bisa dikatakan bahwa penyebaran tidak merata dan masih terkonsentrasi di perkotaan dan struktur penduduk Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa di dominasi oleh penduduk usia muda produktif.

Kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah pada tiap-tiap desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa secara jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Kepadatan Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk Per (Km ²)	Pertumbuhan/ Tahun (%) 2010-2020
1.	Kanreapia	5,83	1,09	192	7,48
2.	Balassuka	29,00	1,07	106	1,92
3.	Tabbinjai	24,35	1,04	121	-0,02
4.	Mamampang	21,55	1,01	112	4,25
5.	Tonasa	42,00	1,04	120	7,48
6.	Tamaona	12,38	1,01	302	6,26
7.	Pao	24,62	1,02	95	4,99
8.	Erelembang	51,09	1,06	83	6,65
9.	Bolaromang	21,00	1,07	50	4,96
Jumlah		251,82	1,05	115	5,26

Sumber : Gowa Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tiap wilayah desa/kelurahan, didominasi Desa Kanreapia, Desa Tonasa, Kelurahan Tamaona, dan Desa Erelembang dengan laju pertumbuhan penduduk keseluruhan sebesar 5,26% untuk periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 untuk Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.

B. Organisasi Pemangku Kawasan Hutan di Kabupaten Gowa

1. Kelembagaan KPH Jeneberang

Secara kelembagaan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021, tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Gowa yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Gowa.

Wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.371/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang Kehutanan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Dalam menjalankan program dan kegiatannya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) selama 10 Tahun, dimana pada RPHJP Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang Periode Tahun 2023 – 2032 telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan pengesahan Nomor : SK.10230/MenLHK/PHL/BRPH/HPL.0/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022. Sebagai penjabaran rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd).

2. Unsur Organisasi KPH Jeneberang

Unsur Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPT. KPH Jeneberang
- b. Pelaksana adalah Seksi, Kelompok Jabatan Pelaksana, dan kelompok jabatan Fungsional.

Adapun susunan organisasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang, terdiri atas :

- a. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan sesuai wilayah kerja masing-masing. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan kesatuan pengelolaan hutan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan teknis kesatuan pengelolaan hutan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesatuan pengelolaan hutan;
- 4) Pelaksanaan administrasi UPT;

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :

1) Jabatan Fungsional : Arsiparis Pertama dan Arsiparis Mahir

2) Jabatan Pelaksana, antara lain :

- Penyusun Anggaran Program dan Pelaporan
- Penyusun Laporan Keuangan
- Pengelola Kepegawaian
- Pengadministrasi Umum

c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Dipimpin oleh Kepala Seksi yang membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional perencanaan dan pemanfaatan hutan berdasarkan wilayah kerja. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi :

1) Jabatan Fungsional : Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)

2) Jabatan Pelaksana, antara lain :

- Analisis Pengembangan Hutan
- Analisis Hasil Hutan

- Penelaah Data Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu
- Pengadministrasi Umum

d. Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan wilayah kerja. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:

- 1) Jabatan Fungsional : Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan
- 2) Jabatan Pelaksana, antara lain :
 - Analis Rehabilitasi dan Konservasi
 - Analis Informasi Sumberdaya Hutan
 - Analis Permasalahan Hukum
 - Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha
 - Pengelola Pelestarian Sumberdaya Alam
 - Pengadministrasi Umum

3. Keadaan Aparat Sipil Negara KPH Jeneberang

Aparat Sipil Negara (ASN) pada KPH Jeneberang berjumlah 54 Orang dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Adapun komposisi Aparat Sipil Negara pada KPH Jeneberang menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6. Komposisi Aparat Sipil Negara Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang, Menurut Tingkat pendidikan, 2023

Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sekolah Dasar	-	0,00
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	-	0,00
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	15	27,78
Akademi / D-3	-	0,00
Sarjana / S-1	31	57,41
Pasca Sarjana /S-2	8	14,81
Jumlah	54	100,00

Sumber : UPT. KPH Jeneberang, 2023.

Tabel 4.6 menjelaskan bahwa Aparat Sipil Negara UPT. KPH Jeneberang sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan S1, sebesar 57,41%. sedangkan tingkat pendidikan SLTA sebesar 27,78% dan S2 sebesar 14,81%. Hal tersebut menunjukkan bahwa para Aparat Sipil Negara pada UPT. KPH Jeneberang cukup potensial apabila dilihat dari latar belakang pendidikan.

C. Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Gowa

1. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya

Luas kawasan hutan di Kabupaten Gowa menurut fungsinya seluas 57.152 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 20.578 Ha, Hutan Produksi seluas 16,397 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 12.419 Ha, dan Kawasan Konservasi seluas 7.758 Ha. Luas kawasan hutan menurut

fungsinya yang ada di Kabupaten Gowa dapat dilihat Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Gowa Menurut Fungsinya

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (ha)
1.	Hutan Lindung	20.578
2.	Hutan Produksi	16.397
3.	Hutan Produksi Terbatas	12.419
4.	Kawasan Konservasi	7.758
Jumlah		57.152

Sumber : UPT. KPH Jeneberang, 2023.

Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa persentase luas kawasan hutan dari total luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Gowa, terdiri dari : Kawasan Hutan Lindung sebesar 36,05%, Kawasan Hutan Produksi sebesar 28,67%, Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 21,71% dan Kawasan Konservasi sebesar 13,56%.

Kawasan Hutan yang menjadi kewenangan pengelolaan KPH Jeneberang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.371/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sulawesi Selatan adalah seluas 49.394 Ha, yang terdiri dari : Hutan Lindung seluas 20.578 Ha, Hutan Produksi seluas 16.397 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas seluas 12.419 Ha. Sedangkan pengelolaan Kawasan Konservasi seluas 7.758 Ha, merupakan kewenangan Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Hutan Wilayah Sulawesi.

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang Periode Tahun 2023 – 2032 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan pengesahan Nomor : SK.10230/MenLHK/PHL/BRPH/HPL.0/12/2022, Tanggal 27 Desember 2022, kawasan hutan yang menjadi kewenangan UPT. KPH Jeneberang, dibagi menjadi blok-blok pengelolaan, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Blok Pengelolaan Kawasan Hutan Kewenangan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang

No.	Blok	Fungsi Hutan (Ha)			Luas Total (Ha)
		HL	HP	HPT	
1	Blok Inti	12.439,26	-	-	12.439,26
2	Blok Khusus	2.122,00	3.174,19	567,78	5.863,97
3	Blok Pemanfaatan	6.016,76	10.894,57	10.874,04	27.785,37
4	Blok Perlindungan	-	2.328,49	977,24	3.305,73
	Jumlah	20.578,02	16.397,25	12.419,06	49.394,33

Sumber : UPT. KPH Jeneberang, 2023.

Tabel 4.8 memperlihatkan bahwa luas kawasan hutan di Kabupaten Gowa yang diarahkan untuk izin pemanfaatan termasuk perhutanan sosial seluas 27.758,37 Ha, yang terdapat pada Kawasan Hutan Lindung seluas 6.016,76 Ha, Kawasan Hutan Produksi seluas 10.894,57, dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 10.874,04 Ha.

2. Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Gowa

Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Gowa dimulai sejak Tahun 2017 yang ditandai dengan terbitnya izin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari, pada kawasan hutan lindung di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa seluas 294 Ha. Selanjutnya terbit izin kelompok-kelompok tani hutan pengelola perhutanan sosial yang lain di Kabupaten Gowa, yang telah dikelola untuk izin pengelolaan perhutanan sosial seluas 5.958 Ha, yang dikelola oleh 19 kelompok perhutanan sosial dan tersebar pada 5 (lima) kecamatan dan 14 (empat belas) desa/ kelurahan, yaitu :

- a. Kecamatan Tombolopao sebanyak 8 (delapan) kelompok yang tersebar di Desa Erelembang, Desa Pao, dan Desa Tonasa.
- b. Kecamatan Tinggimoncong sebanyak 5 (lima) kelompok yang tersebar di Kelurahan Bontolerung, Kelurahan Gantarang, Kelurahan Garassi dan Kelurahan Bulutana.
- c. Kecamatan Bontolempangan sebanyak 2 (dua) kelompok yang berada di Desa Paladingan.
- d. Kecamatan Bungaya sebanyak 2 (dua) kelompok yang tersebar di Desa Bissoloro dan Desa Buakkang.
- e. Kecamatan Tompobulu sebanyak 2 (dua) kelompok yang tersebar di Desa Rappoala dan Desa Rappolemba.

3. Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari

- a. Profil Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari

Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, Nomor : 01/KTRL/I/ 2016 Tanggal 4 Januari 2016, yang berkedudukan di Dusun Tombolo Loe Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Adapun data Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari adalah sebagai berikut :

1) Letak Administrasi

- ❖ Dusun : Tombolo Loe
- ❖ Desa : Erelembang
- ❖ Kecamatan : Tombolopao
- ❖ Kabupaten : Gowa
- ❖ Provinsi : Sulawesi Selatan

2) KPH : Jeneberang

3) Letak Hidrologi : DAS Maros

4) Letak Geografis : 5° 14' 75" LS dan 119° 89' 44" BT

5) Batas-Batas :

- ❖ Utara : Kabupaten Bone
- ❖ Timur : Kelurahan Tamaona dan Desa Pao
- ❖ Selatan : Desa Tonasa
- ❖ Barat : Kabupaten Maros

6) Kelembagaan

- ❖ Nama : Kelompok Tani Rimba Lestari
- ❖ Nomor Pengukuhan : 01/DEL/I/2016

- ❖ Tanggal Pengukuhan : 4 Januari 2016
- ❖ Yang Mengukuhkan : Kepala Desa Erelembang
- ❖ Ketua : Nanji Alle
- ❖ Sekretaris : Rusli
- ❖ Bendahara : Muh. Tahir

Bedasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.7015/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 12/2017 Tanggal 27 Desember 2017, Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari telah diberikan Izin Hak Kelola Kawasan berupa Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas 294 Ha di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah anggota sebanyak 94 Orang.

Dalam upaya optimalisasi areal ijin Perhutanan Sosial yang dikelola, maka salah satu rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari adalah pembangunan pemanfaatan areal di bawah tegakan hutan dalam bentuk pembuatan areal agroforestry.

Pada Tahun 2020 Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari resmi terdaftar sebagai salah satu kelompok tani hutan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 522/3266/DISHUT, Tanggal 14 Oktober 2020 dengan jenis kegiatan berupa agroforestry.

b. Areal Izin Hutan Kemasyarakatan Rimba Lestari

- 1) Jenis Ijin : Hutan Kemasyarakatan (HKm)
- 2) Pejabat Pemberi Ijin : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 3) Nomor : SK.7015/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 12/2017
- 4) Tanggal : 29 Desember 2017
- 5) Luas : 294 Ha
- 6) Fungsi Hutan : Hutan Lindung
- 7) Kondisi Penutupan Lahan : Hutan Sekunder, sebagian yang berhutan
- 8) Jenis Vegetasi Dominan : Pinus, Kayu Rimba Campuran, Semak Belukar
- 9) Jenis Fauna : Babi dan Monyet
- 10) Potensi Jasa Lingkungan : Pemanfaatan jasa penyimpanan/ penyerapan karbon dan suplai oksigen, jasa tata air.
- 11) Jenis Tanah : Podsolik kuning
- 12) Tekstur Tanah : Lempung atau berpasir
- 13) Kesuburan Tanah : Relatif Sedang
- 14) Topografi : Permukaan lahan berbukit, bergunung dan sebagian terjal
- 15) Tata Letak :
 - ❖ Sebelah Utara : 119° 90' 84" BT - 05° 11' 11" LS
 - ❖ Sebelah Timur : 119° 90' 19" BT - 05° 14' 35" LS
 - ❖ Sebelah Selatan : 119° 90' 68" BT - 05° 14' 77" LS
 - ❖ Sebelah Barat : 119° 90' 54" BT - 05° 14' 50" LS

BAB V

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

1. Umur

Petani responden memiliki umur, dengan kisaran umur antara 28 – 66 tahun. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa umur responden sebagian besar berada di usia yang produktif. Klasifikasi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Distribusi Umur Petani Responden dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No.	Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	28 – 39	16	53,33
2	40 – 51	10	33,33
3	52 – 66	4	13,33
Total		30	100,00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2023.

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa petani responden pada lokasi penelitian sebagian besar berada pada usia yang relatif sangat produktif (53,33%), sehingga kegiatan perhutanan sosial sangat didukung oleh generasi muda tani. Dengan demikian perlu dukungan berbagai pihak agar keberlanjutan perhutanan sosial bisa dikembangkan secara terus menerus.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan petani merupakan suatu identitas responden yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam berusahatani. Karena kemajuan yang dicapai dalam segala bidang tidak terlepas hasil dari pendidikan. Adapun tingkat pendidikan yang diambil dari 30 orang responden yang ada di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel 5.2. berikut.

Tabel 5.2. Tingkat Pendidikan Anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	TT SD	5	17
2.	SD	19	63
3.	SMP	6	20
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2023

Tabel 5.2. menunjukkan tingkat skala pendidikan petani dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Jumlah responden yang tidak tamat sekolah sebanyak 5 orang dengan persentase 17%, tingkat pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar sebanyak 19 orang dengan persentase 63%, dan tingkat pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama sebanyak 6 orang dengan persentase 20%. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan responden tergolong masih sangat rendah.

Tingkat pendidikan responden tersebut dapat berpengaruh terhadap pemahaman petani tentang teknologi dan inovasi dalam berusahatani dan secara tidak langsung juga dapat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahendra (2014) yang menyatakan bahwa petani yang memiliki pendidikan lebih tinggi, baik formal maupun informal mempunyai wawasan yang lebih luas terutama dalam pemahaman tentang produktivitas.

3. Pengalaman Usahatani

Selain tingkat pendidikan yang dimiliki petani, faktor lain yang dianggap cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan usahatani adalah pengalaman dalam berusahatani. Anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yang menjadi responden mempunyai pengalaman berusahatani yang cukup bervariasi dalam berusahatani. Pengalaman dalam berusahatani dapat menjadi faktor yang berdampak banyak pada kemampuan petani dalam mengelola lahan usahatannya. Petani yang lebih lama berusahatani lebih mudah menerapkan metode-metode atau cara-cara berusahatani yang baik dibandingkan dengan petani yang lebih muda. Hal tersebut dikarenakan pengalaman yang lebih banyak sehingga sudah dapat membuat perbandingan dalam mengambil keputusan (Kusuma, 2006).

Adapun pengalaman berusahatani yang diambil dari 30 orang responden yang ada di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Pengalaman Berusahatani Anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No.	Kisaran Pengalaman Berusahatani (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	10 – 19	10	33
2.	20 – 29	13	43
3.	30 – 39	4	13
4.	40 – 49	3	10
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2023

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa pengalaman berusahatani anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yang menjadi responden cukup tinggi. Pengalaman berusahatani antara 20 – 29 tahun menduduki tingkatan tertinggi sebanyak 13 orang atau dengan persentase sebesar 43%. Hal tersebut dipengaruhi oleh karena rata-rata anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa mempunyai pekerjaan utama sebagai petani.

4. Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga adalah merupakan keseluruhan anggota keluarga yang memiliki beban hidup bagi petani responden bersangkutan. Anggota keluarga petani terdiri dari petani itu sendiri, istri, anak dan anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan petani atau kepala keluarga petani responden. Untuk mengetahui distribusi petani responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4. Jumlah Tanggungan Keluarga Anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No.	Tanggungan Keluarga (Orang)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	1 – 2	5	16
2.	3– 4	14	47
3.	5 – 6	11	37
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2023

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden (47%) memiliki jumlah tanggungan keluarga antara 3 sampai 4 orang. Tanggungan keluarga tersebut relatif banyak, sehingga dapat dialokasikan sebagai sumberdaya manusia dalam upaya mengembangkan usahataniya.

5. Lahan Garapan

Lahan merupakan sesuatu yang penting dalam suatu kegiatan dalam berusahatani. Dengan tersedianya lahan garapan yang cukup bagi petani yang berarti potensi lahan yang ada di lokasi dapat meningkatkan pendapatan bila dikembangkan dengan lebih efektif, karena luas lahan garapan petani berpengaruh pada aktifitas petani dan produksi usahatani (Mubyarto, 1986 dalam Rico, 2013).

Lahan garapan responden dibedakan menjadi 2 (dua) kriteria yaitu lahan garapan yang berada didalam kawasan hutan atau didalam areal izin perhutanan sosial dan lahan garapan yang berada diluar areal perhutanan sosial yang merupakan lahan milik pribadi yang telah mempunyai alas hak berupa sertifikat kepemilikan dan bertujuan untuk dijadikan lahan untuk berusahatani berupa lahan kebun dan lahan sawah. Luas lahan garapan responden di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dapat dilihat dari Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Lahan Garapan Anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No.	Kisaran Luas Lahan Garapan (Ha)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	2,50 – 4,40	19	63
2.	4,50 – 6,40	8	27
3.	6,50 – 8,40	1	3
4.	8,50 – 10,40	2	7
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2023

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa luas lahan yang dikelola petani untuk usahatani cukup bervariasi. Kelompok yang paling dominan adalah kelompok dengan luas lahan 2,50 - 4,40 ha yaitu sebanyak 19 orang dengan jumlah persentase 63% dari jumlah responden. Sementara itu, kelompok dengan luas lahan paling sedikit adalah kelompok 6,50 - 8,40 ha yang hanya 1 orang responden. Luas lahan berpengaruh pada besarnya produktivitas atau hasil yang akan didapatkan oleh petani.

6. Lamanya Bergabung Dalam Kelompok Tani Hutan

Lamanya bergabung dalam kelompok tani hutan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jangka waktu (tahun) yang telah dijalani petani hutan sejak bergabung dalam organisasi Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Lamanya bergabung dalam Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dapat dilihat dari Tabel 5.6.

Tabel 5.6. Lamanya Bergabung Dalam Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No.	Kisaran Lamanya Dalam KTH (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	5 – 10	7	23

2.	11 – 15	5	17
3.	16 – 20	9	30
4.	21 – 25	7	23
5.	26 – 30	1	3
6.	31 – 35	1	3
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2023

Tabel 5.6 memperlihatkan bahwa pengalaman responden menjadi anggota Kelompok Tani Hutan, didominasi oleh lamanya bergabung antara 16 - 20 tahun yaitu sebanyak 9 orang dengan jumlah persentase 30% dari jumlah responden. Lamanya petani bergabung dalam kelompok tani hutan berpengaruh pada pengalaman dan pengetahuan tentang usahatani yang didapatkan sehingga dapat pula berpengaruh terhadap besarnya produktivitas atau hasil yang akan didapatkan.

B. Implementasi Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Gowa dimulai sejak Tahun 2017 yang ditandai dengan terbitnya izin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari, pada kawasan hutan lindung di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa seluas 294 Ha. Selanjutnya terbit izin kelompok-kelompok tani hutan pengelola perhutanan sosial yang lain di Kabupaten Gowa, sehingga sampai dengan Tahun 2023 telah terbit izin pengelolaan perhutanan sosial sebanyak 19 izin pengelolaan.

Terkhusus di Kecamatan Tombolopao telah terbit izin pengelolaan Perhutanan Sosial sebanyak 8 izin pengelolaan yang tersebar pada 4 (empat) desa, yaitu Desa Erelembang sebanyak 3 izin pengelolaan, Desa Pao sebanyak 2 izin pengelolaan, Desa Tabbinjai sebanyak 2 izin pengelolaan, dan Desa Tonasa sebanyak 1 izin pengelolaan.

Dalam penerapannya pengelolaan perhutanan sosial, kelompok tani hutan pemegang izin pengelolaan perhutanan sosial diberikan akses kelola kawasan hutan, tentunya dengan berbagai aturan-aturan berupa larangan yang harus ditaati, antara lain :

1. Memindahtangankan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
2. Menanam kelapa sawit pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
3. Mengagunkan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
4. Menebang pohon pada areal hutan lindung dan/atau areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
5. Menggunakan peralatan mekanis pada hutan lindung dan/atau Areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

6. Membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada hutan lindung dan/atau Areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
7. Menyewakan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.
8. Menggunakan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk kepentingan lain.
9. Mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
10. Melakukan aktivitas dengan metode pembakaran dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran.

Disamping larangan-larangan tersebut di atas, kelompok tani hutan yang menjadi pengelola perhutanan sosial juga diberikan hak dan kewajiban yang tertuang dalam izin pengelolaan masing-masing.

Adapun kewajibannya, antara lain :

1. Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.
2. Menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.
3. Memberi tanda batas areal kerjanya.
4. Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

5. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya.
6. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
7. Membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mempertahankan fungsi hutan.
9. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan areal kerja persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Sedangkan hak yang diberikan kepada kelompok pengelola perhutanan sosial, antara lain :

1. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain.
2. Mengelola dan memanfaatkan persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan, sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu.
3. Mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal kerja persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan.
4. Mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan.
5. Mendapat pendampingan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan serta penyelesaian konflik.
6. Mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya.

7. Mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan.
8. Mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

Implementasi program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dengan melibatkan Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari sebagai pelaksana langsung berbagai program dan kegiatan perhutanan sosial yang ada di dalam areal kerjanya. Pelaksanaan hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan didampingi langsung oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang) dan Balai Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi. Adapun yang terkait dengan hak-hak yang telah didapatkan antara lain :

1. Mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan serta penyelesaian konflik berupa pendampingan dari berbagai unsur pemerintah seperti pendampingan dari penyuluh kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang dan Balai Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi.
2. Mendapatkan pendampingan dalam pemberian tanda batas areal kerjanya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Sulawesi Selatan (UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang).

3. Mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang dan Balai Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi.
4. Mendapatkan pendampingan pengembangan usahanya berupa pemberian bantuan alat ekonomi produktif dari BPHP Wilayah Sulawesi berupa sarana pengolahan biji kopi.
5. Mendapatkan pendampingan kemitraan dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam penyadapan getah pinus.

C. Pendapatan Rumah Tangga Petani dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pendapatan rumah tangga petani pada Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari, sepenuhnya berasal dari pendapatan On Farm berupa usahatani tanaman hutan dan usahatani non tanaman hutan. Hal tersebut disebabkan aktifitas yang dilakukan petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya bersumber dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan bidang pertanian dan kehutanan.

1. Usahatani tanaman hutan

Usahatani tanaman hutan yang diupayakan oleh anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari adalah berupa usahatani penyadapan getah pinus didalam kawasan hutan. Didalam

kawasan hutan Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao terdapat banyak jenis tanaman hutan berupa pohon seperti Mahoni, Suren, Bayam Jawa, Eucalyptus, dan tanaman buah-buahan. Namun kondisi kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai hutan lindung yang tidak memperbolehkan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu, sehingga usahatani yang dianggap cocok adalah usahatani penyadapan getah pinus atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Dalam menjalankan usahatannya, Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari menjalin kerjasama dengan mitra swasta dalam hal permodalan dan pemasaran produksi. Mitra memberikan modal berupa sarana dan prasarana produksi berupa peralatan dan bahan-bahan lainnya untuk proses penyadapan getah pinus dan menampung hasil sadapan untuk dipasarkan ke pabrik-pabrik pengolahan getah pinus. Sedangkan anggota kelompok tani berfungsi sebagai penyadap getah pinus pada lahan-lahan atau andil garapan masing-masing yang ada didalam kawasan hutan.

2. Usahatani non tanaman hutan

Usahatani non tanaman yang diupayakan oleh anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari adalah berupa tanaman kopi, tanaman padi, dan tanaman semusim berupa; tanaman lombok, tanaman tomat pada lahan-lahan milik berupa kebun dan sawah diluar kawasan hutan. Khusus untuk tanaman kopi, sebagian ada

pula yang ditanam didalam kawasan hutan disela-sela pohon pinus.

Produksi usahatani tanaman padi, usahatani tanaman kopi, dan usahatani tanaman semusim berupa Lombok dan tomat, sebagian dijual melalui pengepul atau pedagang yang datang langsung ke lokasi pemanenan, yang selanjutnya dipasarkan di ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten, dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri oleh petani.

Kontribusi pendapatan on farm berupa usahatani tanaman hutan, usahatani non tanaman hutan, pendapatan off farm, pendapatan non farm terhadap pendapatan rumah tangga petani dalam program perhutanan sosial pada Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari di Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7. Pendapatan Rumah Tangga Petani per hektar per tahun dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No.	Sumber Pendapatan	Nilai (Rp/ha/tahun)	Persentase (%)
A	Tanaman hutan		
1	Usahatani tanaman hutan (getah pinus)	7.371.527,78	43,00
B	Tanaman non hutan		
1	Usahatani tanaman kopi	866.319,44	5,05
2	Usahatani padi sawah	6.342.366,93	37,00
3	Usahatani tanaman lainnya	2.562.111,80	14,95
Total pendapatan rumah tangga		17.142.325,95	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Tabel 5.7. memperlihatkan bahwa pendapatan rumah tangga petani per hektar per tahun dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yang bersumber dari pendapatan usahatani tanaman hutan berupa penyadapan getah pinus, memberikan kontribusi sebesar 43,00%, pendapatan usahatani non tanaman hutan berupa usahatani tanaman kopi memberikan kontribusi sebesar 5,05%, usahatani padi sawah memberikan kontribusi sebesar 37,00%, dan usahatani tanaman lainnya atau tanaman semusim memberikan kontribusi sebesar 14,95% dari total pendapatan rumah tangga petani per tahun.

Pendapatan off farm dan pendapatan non farm tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap pendapatan rumah tangga petani, disebabkan anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari yang menjadi responden, tidak ada yang mempunyai pekerjaan lain seperti buruh tani, buruh bangunan, dan jasa, tetapi hanya melakukan pekerjaan sebagai petani dan melakukan usahatani pada lahan-lahan milik sendiri.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Petani Hutan dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

Pendapatan rumah tangga petani pada Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, diduga

dipengaruhi oleh luas lahan garapan hutan, pendapatan tanaman hutan, pendapatan non tanaman hutan, dan lama menjadi anggota kelompok tani hutan. Faktor-faktor tersebut selanjutnya diestimasi dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan hasil seperti yang terlihat pada Tabel 5.8 berikut ini.

Tabel 5.8. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Petani Hutan dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

Variabel Bebas	Koefisien	Standar Error	P
Luas lahan garapan hutan (X1)	-0,060531 ^{ns}	0,042070	0,1626
Pendapatan tanaman hutan (X2)	0,590585 ^{***}	0,058040	0,0000
Pendapatan non tanaman hutan (X3)	0,490259 ^{***}	0,017299	0,0000
Lama menjadi anggota KTH (X4)	0,042713 ^{**}	0,018019	0,0258
Konstanta = -0,681810 R ² = 0,981053 F hitung = 323,6151 Prob = 0,000000	^{***} = signifikan ($\alpha = 0,01$) ^{**} = signifikan ($\alpha = 0,05$) [*] = signifikan ($\alpha = 0,10$) ns = non signifikan		
$LNY = -0,68181 - 0,06053 \cdot LNX1 + 0,59059 \cdot LNX2 + 0,49026 \cdot LNX3 + 0,04271 \cdot LNX4$			

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2023

Tabel 5.8 memperlihatkan bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,981053 yang berarti bahwa seluruh variabel luas lahan garapan hutan, pendapatan tanaman hutan, pendapatan non tanaman hutan, dan lama menjadi anggota kelompok tani hutan secara

bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga petani sebesar 98,11 persen, sedangkan sisanya 1,89 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil analisis regresi maka secara parsial variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumah tangga petani di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa adalah pendapatan tanaman hutan, pendapatan non tanaman hutan, dan lama menjadi anggota kelompok tani hutan. Pendapatan tanaman hutan berpengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga petani, artinya apabila pendapatan tanaman hutan bertambah satu persen maka pendapatan rumah tangga petani akan naik sebesar 0,5906 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan tanaman hutan maka pendapatan rumah tangga petani juga akan semakin tinggi.

Pengaruh pendapatan usahatani non tanaman hutan terhadap pendapatan rumah tangga petani adalah positif, artinya apabila jumlah pendapatan usahatani non tanaman hutan naik sebesar satu persen maka pendapatan rumah tangga petani akan naik sebesar 0,4903 persen. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah pendapatan usahatani non tanaman hutan akan semakin meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.

Pengaruh lama menjadi anggota kelompok tani hutan terhadap pendapatan rumah tangga petani adalah positif, artinya apabila lama

menjadi anggota kelompok tani hutan bertambah sebesar lima persen maka pendapatan rumah tangga petani akan naik sebesar 0,0427 persen. Dengan demikian, semakin lama menjadi anggota kelompok tani hutan maka akan semakin meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.

Pengaruh luas lahan garapan hutan terhadap pendapatan rumah tangga petani adalah negatif tetapi tidak signifikan, artinya apabila luas lahan garapan hutan bertambah satu persen maka pendapatan rumah tangga petani akan turun sebesar 0,0605 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan garapan hutan sudah relatif luas atau berlebihan, sehingga penambahan luas garapan hutan sudah tidak diperlukan lagi, mengingat hanya akan berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga petani.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dilaksanakan dengan melibatkan kelompok tani hutan yang telah mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial sebagai pelaku utama, dan mendapatkan pendampingan dalam setiap tahapan program dan kegiatannya dari instansi pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi). Implementasi program perhutanan sosial secara umum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga petani hutan.
2. Tingkat pendapatan rumah tangga petani dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yang bersumber dari pendapatan usahatani tanaman hutan berupa penyadapan getah pinus berkontribusi sebesar 43,00% dari total pendapatan rumah tangga petani per tahun. Sedangkan pendapatan usahatani non tanaman hutan berupa usahatani tanaman kopi dengan kontribusi sebesar 5,05%, usahatani padi sawah dengan kontribusi sebesar

37,00%, dan usahatani tanaman lainnya dengan kontribusi sebesar 14,95% dari total pendapatan rumah tangga petani per tahun.

3. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan rumah tangga petani hutan dalam program perhutanan sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa adalah pendapatan tanaman hutan, pendapatan non tanaman hutan, dan lama menjadi anggota kelompok tani hutan. Apabila pendapatan tanaman hutan bertambah satu persen maka pendapatan rumah tangga petani akan naik sebesar 0,5906 persen. Demikian pula dengan pendapatan usahatani non tanaman hutan naik sebesar satu persen maka pendapatan rumah tangga petani akan naik sebesar 0,4903 persen. Sedangkan untuk variabel lama menjadi anggota kelompok tani hutan, apabila bertambah sebesar lima persen maka pendapatan rumah tangga petani akan naik sebesar 0,0427 persen.

B. Saran

1. Dalam implementasi Program Perhutanan Sosial perlu dikembangkan dengan menjadikan kelompok tani hutan yang telah mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial sebagai pelaku utama, namun mendapatkan pendampingan dalam setiap tahapan program dan kegiatannya dari instansi pemerintah terkait.
2. Dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga petani dalam program perhutanan sosial sangat perlu dikembangkan dengan

menggunakan pola agroforestry yaitu dengan memadukan usahatani tanaman hutan dan usahatani non tanaman hutan.



DAFTAR PUSTAKA

Artikel LHK. *Hutan Kemasyarakatan (HKm)*. Diakses tanggal 2 Pebruari 2023. 10.41.

Asep Yunan Firdaus. 2018. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka PENCEPATAN Reformasi Tenurial Hutan*. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Badan Pusat Statistik. *Istilah*. Diakses tanggal 2 Pebruari 2023. Pukul 10.51.

Badan Riset dan Inovasi Nasional. *Inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing kehutanan*. Diakses tanggal 13 Nopember 2022. Pukul 06.28

Christina S. Parissing. 2021. *Kelompok Tani : Denifinisi, Ciri, dan Peran*. Artikel. Diakses tanggal 16 September 2022.

Departemen Kehutanan. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Jakarta

detikbali. *"Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya"*. Diakses tanggal 2 Pebruari 2023. 09.58.

Erma Suryani, Supriyati (2015). *Dinamika Struktur Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan di Desa Sawah Berbasis Padi*. Ripositori Balitbangtan

Firdaus, M. et al. 2009. *Penentuan Komoditas Pertanian Unggulan Di Kabupaten Jember*. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP).

kajianpustaka.com. *Penyuluhan (Pengertian, Tujuan, Program, Metode dan Media)*. Diakses tanggal 2 Pebruari 2023. 11.05.

lindungihutan. *Hutan adalah : Pengetian, Jenis, Ciri-ciri dan Manfaat Hutan*. Diakses tanggal 2 Pebruari 2023. 10.24.

ilmugeografi.com. *Hutan adalah : Pengetian Lahan Garapan*. Diakses tanggal 2 Pebruari 2023. 10.58.

Ina.or.id. *"Kelompok Tani yang Efektif"*. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-11-01. Diakses tanggal 27 Juni 2014.23.30.

Kampus2UNCP. *Regresi Linear Berganda*. Diakses tanggal 12 Nopember 2022. Pukul 22.12

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.13/Menhut-II/2011 juncto Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Men LHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perhutanan Sosial*. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial*. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*. Jakarta

Kementerian Pertanian. 2014. *"Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045: Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan"*. Diakses tanggal 14 Januari 2022.

Liputan 6. *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya*. Diakses tanggal 2 Peberuari 2023.10.09.

litbang.deptan.go.id."*Penguatan Kelompok Tani*". Diakses tanggal 27 Juni 2014.24.00

mediaindonesia.com. *Pengertian Teknologi Menurut Ahli Berikut Manfaatnya*. Diakses tanggal 13 Nopember 2022. Pukul 06.15

Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. Jakarta

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. "*Kinerja Kelompok Tani Dalam Sistem Usaha Tani Padi dan Metode Pemberdayaannya*". Diakses tanggal 27 Juni 2014.11.35

Ranah research. *Pengertian metode penelitian survei*. Diakses tanggal 12 Nopember 2022. 21.02

RimbaKita.com. *Agroforestry – Pengertian, Manfaat, Tujuan, Keunggulan & Kelemahan*. Diakses tanggal 13 Nopember 2022. Pukul 06.42

RimbaKita.com. *Pengertian Hutan, Bagian, Jenis dan Fungsinya*. Diakses tanggal 2 Pebruari 2023. Pukul 10.34.

Sari, D.K., Haryono, D., & Rosanti, N. (2014). Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Agribisnis*. 2(1): 64-70.

Soekartawi. 2005. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. UI Press.

Sudut Hukum. *Pengetian Rumah Tangga*. Diakses tanggal 2 Pebruari 2023. 10.46

Wikipedia. Ensiklopedia Bebas. *Determinan*. Diakses tanggal 2 Pebruari 2023. 09.51

Lampiran 1. Identitas Responden Petani dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No.	Nama Responden	Umur (tahun)	Tingkat Pendidikan	Tanggungjawab Keluarga	Luas Garapan Hutan (ha)	Luas Lahan Mlik (ha)	Pengalaman Usahatani (tahun)	Lama Anggota KTH (tahun)	Intensitas Penyuluhan PS (kali)
1	Nanji Alle	66	SD	2	5,00	5,00	49	21	1
2	Ridwan	46	SD	5	2,00	2,00	25	15	1
3	Arman	35	SD	4	2,00	2,00	16	13	1
4	Gassing	31	SLTP	3	3,00	3,00	10	10	1
5	Riang	55	TT SD	3	6,00	6,00	20	15	1
6	Esi	60	TT SD	4	2,00	2,00	40	19	1
7	Usman	33	SD	5	3,00	3,00	16	15	1
8	Bahar	38	SLTP	5	2,00	2,00	21	19	1
9	Basri	41	SD	4	1,00	1,00	24	20	1
10	Baharuddin	60	SD	4	3,00	3,00	43	20	1
11	Samsu	47	SD	5	4,00	4,00	32	28	1
12	Amrin	32	SD	3	2,00	2,00	17	10	1
13	Angga	39	SD	4	3,00	3,00	24	21	1
14	Rusli	28	SD	3	2,00	2,00	13	7	1
15	Hendra	34	SLTP	2	1,00	1,00	19	18	1
16	Sabala	48	SD	3	3,00	3,00	33	32	1
17	Nurlia	48	SD	6	1,00	1,00	33	25	1
18	Takdir	35	SLTP	5	3,00	3,00	20	15	1
19	Jumalang	39	SD	2	4,00	4,00	24	18	1
20	Cudding	39	TT SD	4	2,00	2,00	24	18	1
21	Abd. Majid	48	SD	5	2,00	2,00	33	23	1
22	Taufik	30	SD	2	1,50	1,50	15	10	1
23	Kila	32	TT SD	2	1,00	1,00	17	9	1
24	Nurpiah	43	SLTP	4	2,00	2,00	28	21	1
25	Anwar	36	SD	3	1,00	1,00	21	17	1
26	Zainuddin	41	SLTP	6	2,00	2,00	26	21	1
27	Irawan	29	SD	4	2,00	2,00	14	7	1
28	Abidin	34	SD	5	2,50	2,50	19	9	1
29	Nasir	43	TT SD	5	2,00	2,00	28	20	1
30	M. Ali	40	SD	4	2,00	2,00	25	25	1
	Rata-rata	41,00	-	3,87	2,40	2,40	24,30	17,37	1,00
	Maksimum	66,00	-	6,00	6,00	6,00	49,00	32,00	1,00
	Minimum	28,00	-	2,00	1,00	1,00	10,00	7,00	1,00

Lampiran 2. Pendapatan On Farm (Tanaman Hutan) dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No. Resp.	Luas Lahan Garapan Hutan (ha)	Usahatani Tanaman Hutan (Getah Pinus)				
		Produksi (kg)	Harga (Rp/kg)	Penerimaan (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Pendapatan (Rp)
1	5,00	4.200	6.500	27.300.000	4.200.000	23.100.000
2	2,00	3.200	6.500	20.800.000	3.200.000	17.600.000
3	2,00	3.200	6.500	20.800.000	3.200.000	17.600.000
4	3,00	3.600	6.500	23.400.000	3.600.000	19.800.000
5	6,00	5.800	6.500	37.700.000	5.800.000	31.900.000
6	2,00	3.200	6.500	20.800.000	3.200.000	17.600.000
7	3,00	4.000	6.500	26.000.000	4.000.000	22.000.000
8	2,00	3.200	6.500	20.800.000	3.200.000	17.600.000
9	1,00	1.600	6.500	10.400.000	1.600.000	8.800.000
10	3,00	3.500	6.500	22.750.000	3.500.000	19.250.000
11	4,00	3.500	6.500	22.750.000	3.500.000	19.250.000
12	2,00	3.000	6.500	19.500.000	3.000.000	16.500.000
13	3,00	4.000	6.500	26.000.000	4.000.000	22.000.000
14	2,00	3.200	6.500	20.800.000	3.200.000	17.600.000
15	1,00	1.600	6.500	10.400.000	1.600.000	8.800.000
16	3,00	4.300	6.500	27.950.000	4.300.000	23.650.000
17	1,00	1.600	6.500	10.400.000	1.600.000	8.800.000
18	3,00	4.000	6.500	26.000.000	4.000.000	22.000.000
19	4,00	4.200	6.500	27.300.000	4.200.000	23.100.000
20	2,00	3.000	6.500	19.500.000	3.000.000	16.500.000
21	2,00	3.100	6.500	20.150.000	3.100.000	17.050.000
22	1,50	2.000	6.500	13.000.000	2.000.000	11.000.000
23	1,00	1.800	6.500	11.700.000	1.800.000	9.900.000
24	2,00	3.300	6.500	21.450.000	3.300.000	18.150.000
25	1,00	1.500	6.500	9.750.000	1.500.000	8.250.000
26	2,00	3.200	6.500	20.800.000	3.200.000	17.600.000
27	2,00	3.400	6.500	22.100.000	3.400.000	18.700.000
28	2,50	3.800	6.500	24.700.000	3.800.000	20.900.000
29	2,00	3.200	6.500	20.800.000	3.200.000	17.600.000
30	2,00	3.300	6.500	21.450.000	3.300.000	18.150.000
Rata-rata	2,40	3.216,67	6.500,00	20.908.333,33	3.216.666,67	17.691.666,67
Rata-rata Per ha		1.340,28		8.711.805,56	1.340.277,78	7.371.527,78

Lampiran 3. Pendapatan On Farm (Tanaman Kopi) dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No. Resp.	Luas Lahan Garapan Hutan (ha)	Usahatani Tanaman Kopi				
		Produksi (kg)	Harga (Rp/kg)	Penerimaan (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Pendapatan (Rp)
1	5,00	4.000	5.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000
2	2,00	2.000	5.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000
3	2,00	1.000	5.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000
4	3,00	1.500	5.000	7.500.000	3.750.000	3.750.000
5	6,00	600	5.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
6	2,00	2.000	5.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000
7	3,00	700	5.000	3.500.000	1.750.000	1.750.000
8	2,00	500	5.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
9	1,00	700	5.000	3.500.000	1.750.000	1.750.000
10	3,00	750	5.000	3.750.000	1.875.000	1.875.000
11	4,00	400	5.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
12	2,00	800	5.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
13	3,00	450	5.000	2.250.000	1.125.000	1.125.000
14	2,00	500	5.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
15	1,00	250	5.000	1.250.000	700.000	550.000
16	3,00	450	5.000	2.250.000	625.000	1.625.000
17	1,00	500	5.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000
18	3,00	500	5.000	2.500.000	1.125.000	1.375.000
19	4,00	650	5.000	3.250.000	1.250.000	2.000.000
20	2,00	500	5.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
21	2,00	800	5.000	4.000.000	1.625.000	2.375.000
22	1,50	550	5.000	2.750.000	1.250.000	1.500.000
23	1,00	750	5.000	3.750.000	2.000.000	1.750.000
24	2,00	450	5.000	2.250.000	1.375.000	875.000
25	1,00	800	5.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
26	2,00	500	5.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
27	2,00	650	5.000	3.250.000	1.625.000	1.625.000
28	2,50	800	5.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
29	2,00	750	5.000	3.750.000	1.875.000	1.875.000
30	2,00	450	5.000	2.250.000	1.125.000	1.125.000
Rata-rata	2,40	841,67	5.000,00	4.208.333,33	2.060.833,33	2.147.500,00
Rata-rata Per ha		350,69		1.753.472,22	858.680,56	894.791,67

Lampiran 4. Pendapatan On Farm (Padi Sawah) dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No. Resp.	Luas Lahan Sawah (ha)	Usahatani Padi Sawah				
		Produksi (kg)	Harga (Rp/kg)	Penerimaan (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Pendapatan (Rp)
1	2,00	625	22.400	14.000.000	5.640.000	8.360.000
2	2,00	250	22.400	5.600.000	2.256.000	3.344.000
3	0,50	625	22.400	14.000.000	5.640.000	8.360.000
4	3,00	600	22.400	13.440.000	5.414.400	8.025.600
5	2,00	750	22.400	16.800.000	6.768.000	10.032.000
6	3,00	2.000	22.400	44.800.000	6.768.000	38.032.000
7	1,80	750	22.400	16.800.000	6.768.000	10.032.000
8	1,00	500	22.400	11.200.000	4.512.000	6.688.000
9	1,00	700	22.400	15.680.000	6.316.800	9.363.200
10	1,50	650	22.400	14.560.000	5.865.600	8.694.400
11	1,00	500	22.400	11.200.000	4.512.000	6.688.000
12	1,00	400	22.400	8.960.000	3.609.600	5.350.400
13	2,00	550	22.400	12.320.000	4.963.200	7.356.800
14	1,00	650	22.400	14.560.000	5.865.600	8.694.400
15	1,00	750	22.400	16.800.000	6.768.000	10.032.000
16	1,00	500	22.400	11.200.000	4.512.000	6.688.000
17	1,00	750	22.400	16.800.000	6.768.000	10.032.000
18	1,00	500	22.400	11.200.000	4.512.000	6.688.000
19	1,00	650	22.400	14.560.000	5.865.600	8.694.400
20	1,00	650	22.400	14.560.000	5.865.600	8.694.400
21	1,00	350	22.400	7.840.000	3.158.400	4.681.600
22	1,00	650	22.400	14.560.000	5.865.600	8.694.400
23	1,00	750	22.400	16.800.000	6.768.000	10.032.000
24	1,00	500	22.400	11.200.000	4.512.000	6.688.000
25	1,00	700	22.400	15.680.000	6.316.800	9.363.200
26	1,00	500	22.400	11.200.000	4.512.000	6.688.000
27	1,00	650	22.400	14.560.000	5.625.000	8.935.000
28	1,00	650	22.400	14.560.000	5.865.600	8.694.400
29	1,00	650	22.400	14.560.000	5.865.600	8.694.400
30	1,00	500	22.400	11.200.000	4.512.000	6.688.000
Rata-rata	1,29	641,67	22.400,00	14.373.333,33	5.406.380,00	8.966.953,33
Rata-rata Per ha		497,42		11.142.118,86	4.190.992,25	6.951.126,61

Lampiran 5. Pendapatan On Farm dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No. Resp.	Pendapatan On Farm (Rp/tahun)				Total Pendapatan On Farm
	Tanaman Hutan	Tanaman Kopi	Tanaman Padi Sawah	Tanaman Lainnya	
1	23.100.000	10.000.000	8.360.000	-	41.460.000
2	17.600.000	5.000.000	3.344.000	10.000.000	35.944.000
3	17.600.000	2.500.000	8.360.000	6.000.000	34.460.000
4	19.800.000	3.750.000	8.025.600	10.000.000	41.575.600
5	31.900.000	1.500.000	10.032.000	6.000.000	49.432.000
6	17.600.000	5.000.000	38.032.000	10.000.000	70.632.000
7	22.000.000	1.750.000	10.032.000	6.000.000	39.782.000
8	17.600.000	1.250.000	6.688.000	4.000.000	29.538.000
9	8.800.000	1.750.000	9.363.200	7.000.000	26.913.200
10	19.250.000	1.875.000	8.694.400	3.000.000	32.819.400
11	19.250.000	1.000.000	6.688.000	2.000.000	28.938.000
12	16.500.000	2.000.000	5.350.400	700.000	24.550.400
13	22.000.000	1.125.000	7.356.800	4.000.000	34.481.800
14	17.600.000	1.250.000	8.694.400	-	27.544.400
15	8.800.000	550.000	10.032.000	4.500.000	23.882.000
16	23.650.000	1.625.000	6.688.000	-	31.963.000
17	8.800.000	1.500.000	10.032.000	5.000.000	25.332.000
18	22.000.000	1.375.000	6.688.000	-	30.063.000
19	23.100.000	2.000.000	8.694.400	-	33.794.400
20	16.500.000	1.250.000	8.694.400	2.000.000	28.444.400
21	17.050.000	2.375.000	4.681.600	-	24.106.600
22	11.000.000	1.500.000	8.694.400	-	21.194.400
23	9.900.000	1.750.000	10.032.000	3.000.000	24.682.000
24	18.150.000	875.000	6.688.000	2.400.000	28.113.000
25	8.250.000	2.000.000	9.363.200	3.000.000	22.613.200
26	17.600.000	1.250.000	6.688.000	-	25.538.000
27	18.700.000	1.625.000	8.935.000	-	29.260.000
28	20.900.000	2.000.000	8.694.400	2.400.000	33.994.400
29	17.600.000	1.875.000	8.694.400	4.000.000	32.169.400
30	18.150.000	1.125.000	6.688.000	-	25.963.000
Rata-rata	17.691.666,67	2.147.500,00	8.966.953,33	3.275.862,07	31.972.786,67
Rata-rata Per ha	7.371.527,78	894.791,67	6.951.126,61	3.052.993,54	18.270.440

Lampiran 6. Pendapatan On Farm, Off Farm, dan Non Farm dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa

No. Resp.	Pendapatan Petani Hutan (Rp/tahun)			
	Pendapatan On Farm	Pendapatan Off Farm	Pendapatan Non Farm	Total Pendapatan Petani
1	41.460.000	0	0	41.460.000
2	35.944.000	0	0	35.944.000
3	34.460.000	0	0	34.460.000
4	41.575.600	0	0	41.575.600
5	49.432.000	0	0	49.432.000
6	70.632.000	0	0	70.632.000
7	39.782.000	0	0	39.782.000
8	29.538.000	0	0	29.538.000
9	26.913.200	0	0	26.913.200
10	32.819.400	0	0	32.819.400
11	28.938.000	0	0	28.938.000
12	24.550.400	0	0	24.550.400
13	34.481.800	0	0	34.481.800
14	27.544.400	0	0	27.544.400
15	23.882.000	0	0	23.882.000
16	31.963.000	0	0	31.963.000
17	25.332.000	0	0	25.332.000
18	30.063.000	0	0	30.063.000
19	33.794.400	0	0	33.794.400
20	28.444.400	0	0	28.444.400
21	24.106.600	0	0	24.106.600
22	21.194.400	0	0	21.194.400
23	24.682.000	0	0	24.682.000
24	28.113.000	0	0	28.113.000
25	22.613.200	0	0	22.613.200
26	25.538.000	0	0	25.538.000
27	29.260.000	0	0	29.260.000
28	33.994.400	0	0	33.994.400
29	32.169.400	0	0	32.169.400
30	25.963.000	0	0	25.963.000
Rata-rata	31.972.786,67	0	0	31.972.786,67

Lampiran 7. Variabel-variabel dalam Analisis Regresi Linier Berganda

No.	Pendapatan Rumah Tangga (Rp/tahun)	Luas Garapan Hutan (ha)	Pendapatan Tanaman Hutan (Rp/tahun)	Pendapatan Tanaman Non Hutan (Rp/tahun)	Lama Anggota KTH (tahun)
	lnY	lnX1	lnX2	lnX3	lnX4
1	17,54	1,61	16,96	16,73	3,04
2	17,40	0,69	16,68	16,72	2,71
3	17,36	0,69	16,68	16,64	2,56
4	17,54	1,10	16,80	16,90	2,30
5	17,72	1,79	17,28	16,68	2,71
6	18,07	0,69	16,68	17,79	2,94
7	17,50	1,10	16,91	16,69	2,71
8	17,20	0,69	16,68	16,30	2,94
9	17,11	0,00	15,99	16,71	3,00
10	17,31	1,10	16,77	16,42	3,00
11	17,18	1,39	16,77	16,09	3,33
12	17,02	0,69	16,62	15,90	2,30
13	17,36	1,10	16,91	16,34	3,04
14	17,13	0,69	16,68	16,11	1,95
15	16,99	0,00	15,99	16,49	2,89
16	17,28	1,10	16,98	15,93	3,47
17	17,05	0,00	15,99	16,62	3,22
18	17,22	1,10	16,91	15,90	2,71
19	17,34	1,39	16,96	16,19	2,89
20	17,16	0,69	16,62	16,30	2,89
21	17,00	0,69	16,65	15,77	3,14
22	16,87	0,41	16,21	16,14	2,30
23	17,02	0,00	16,11	16,51	2,20
24	17,15	0,69	16,71	16,11	3,04
25	16,93	0,00	15,93	16,48	2,83
26	17,06	0,69	16,68	15,89	3,04
27	17,19	0,69	16,74	16,17	1,95
28	17,34	0,92	16,86	16,39	2,20
29	17,29	0,69	16,68	16,49	3,00
30	17,07	0,69	16,71	15,87	3,22

Lampiran 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: LNY
 Method: Least Squares
 Date: 07/20/23 Time: 23:26
 Sample: 1 30
 Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.681810	1.033779	-0.659532	0.5156
LNX1	-0.060531	0.042070	-1.438815	0.1626
LNX2	0.590585	0.058040	10.17556	0.0000
LNX3	0.490259	0.017299	28.34065	0.0000
LNX4	0.042713	0.018019	2.370525	0.0258
R-squared	0.981053	Mean dependent var	17.24525	
Adjusted R-squared	0.978021	S.D. dependent var	0.253300	
S.E. of regression	0.037552	Akaike info criterion	-3.575156	
Sum squared resid	0.035254	Schwarz criterion	-3.341623	
Log likelihood	58.62734	Hannan-Quinn criter.	-3.500447	
F-statistic	323.6151	Durbin-Watson stat	2.069367	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Estimation Command:

=====
 LS LNY C LNX1 LNX2 LNX3 LNX4

Estimation Equation:

=====

$$\text{LNY} = \text{C}(1) + \text{C}(2)*\text{LNX1} + \text{C}(3)*\text{LNX2} + \text{C}(4)*\text{LNX3} + \text{C}(5)*\text{LNX4}$$

Substituted Coefficients:

=====

$$\text{LNY} = -0.681810311147 - 0.0605306183593*\text{LNX1} +$$

$$0.590585219489*\text{LNX2} + 0.490258951328*\text{LNX3} +$$

$$0.0427134695396*\text{LNX4}$$

Lampiran 9. Kuesioner Penelitian



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS**

**FITRIANI K.
NIM : 105051101221**

Kuesioner Penelitian untuk Tesis

**ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI HUTAN
DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL
DI KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA**

A. Identitas Responden

Nama : No.
 Resp. :
 Umur : tahun
 Pendidikan formal : TT SD / SD / SLTP / SLTA / Diploma / Sarjana
 Pekerjaan pokok :
 Pekerjaan sampingan :
 Jumlah tanggungan keluarga : jiwa
 Pengalaman berusahatani : tahun
 Luas lahan garapan hutan : ha
 Luas lahan hak milik : ha
 Lama menjadi anggota KTH : tahun
 Intensitas penyuluhan perhutanan sosial : kali

B. Pendapatan On Farm

1. Pendapatan Usahatani Tanaman Hutan (per tahun)

- a. Tanaman.....
- | | | |
|-------------|---|--------------------------|
| Produksi | : | kg / kuintal / ton |
| Penerimaan | : | Rp |
| Biaya Total | : | Rp |
| Pendapatan | : | Rp |
- b. Tanaman.....

Produksi : kg / kuintal / ton
 Penerimaan : Rp
 Biaya Total : Rp
 Pendapatan : Rp

c. Tanaman.....

Produksi : kg / kuintal / ton
 Penerimaan : Rp
 Biaya Total : Rp
 Pendapatan : Rp

2. Pendapatan Usahatani Tanaman Non Hutan (per bulan / per tahun)

a. Tanaman.....

Produksi : kg / kuintal / ton
 Penerimaan : Rp
 Biaya Total : Rp
 Pendapatan : Rp

b. Tanaman.....

Produksi : kg / kuintal / ton
 Penerimaan : Rp
 Biaya Total : Rp
 Pendapatan : Rp

c. Tanaman.....

Produksi : kg / kuintal / ton
 Penerimaan : Rp
 Biaya Total : Rp
 Pendapatan : Rp

3. Pendapatan Usaha Ternak / Budidaya Ikan (per bulan / per tahun)

a. Ternak.....

Produksi : kg / kuintal / ton
 Penerimaan : Rp
 Biaya Total : Rp
 Pendapatan : Rp

b. Ternak.....

Produksi : kg / kuintal / ton
 Penerimaan : Rp
 Biaya Total : Rp
 Pendapatan : Rp

b. Ternak / Ikan

Produksi : kg / kuintal / ton
 Penerimaan : Rp
 Biaya Total : Rp
 Pendapatan : Rp

C. Pendapatan Off Farm

1. Pendapatan Buruh Tani (per bulan / per tahun)

- a. Pendapatan : Rp
- b. Pendapatan : Rp
- c. Pendapatan : Rp

2. Pendapatan Jasa Sewa Alat Pertanian (per bulan / per tahun)

- a. Pendapatan : Rp
- b. Pendapatan : Rp
- c. Pendapatan : Rp

D. Pendapatan Non Farm

1. Pendapatan Tukang..... (per bulan / per tahun)

- a. Pendapatan : Rp
- b. Pendapatan : Rp
- c. Pendapatan : Rp

2. Pendapatan Jasa(per bulan / per tahun)

- a. Pendapatan : Rp
- b. Pendapatan : Rp
- c. Pendapatan : Rp

E. Pertanyaan Pendukung

1. Apakah manfaat dari program perhutanan sosial bagi bapak?
.....
2. Apakah kelemahan/kekurangan dari program perhutanan sosial menurut bapak?
.....
3. Apakah ada perbedaan sistem pengelolaan usahatani sebelum dan sesudah ikut dalam program perhutanan sosial menurut bapak?
.....
4. Apakah program perhutanan sosial berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga bapak?
.....
5. Apakah ada aturan pembagian hasil usahatani dari pengelolaan program perhutanan sosial di kelompok bapak?
.....
6. Apakah benih tanaman yang bapak peroleh, berupa bantuan atau diupayakan sendiri?

-
7. Apakah peralatan, pupuk, pestisida dan lain-lain yang bapak gunakan dalam berusaha tani, berupa bantuan atau diupayakan sendiri?
.....
 8. Apakah bapak sering ikut apabila ada penyuluhan dari penyuluh kehutanan?
.....
 9. Apakah bapak sering ikut apabila ada pertemuan kelompok tani?
.....
 10. Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan usahatani agroforestry?
.....















**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Fitriani K.

Nim : 105051101221

Program Studi : S2- Agribisnis

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	10 %	10 %
6	Bab 6	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 31 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinah, S.Hum., M.I.P

NBM.964 591

BAB I Fitriani K. - 105051101221

by Tahap Tutup



Submission date: 30-Jul-2023 12:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 2138682078

File name: 02._Bab_I_FITRIANI_105051101221_oke.docx (47.42K)

Word count: 999

Character count: 6797

ORIGINALITY REPORT

10%	8%	6%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	journal.unhas.ac.id Internet Source	2%
2	Wirna Ariani Pulungan, Samsul Bahri, Rudi Hilmento. "Telaah Faktor Sosial Demografi Terhadap Kesetujuan Masyarakat Pada Rencana Pengembangan Htr Di Kphp Gedong Wani", Jurnal Sylva Lestari, 2015 Publication	2%
3	www.gempurnews.com Internet Source	2%
4	Submitted to Troy University Student Paper	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB II Fitriani K. -

105051101221

by Tahap Tutup



Submission date: 30-Jul-2023 12:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 2138682201

File name: 03._Bab_II_FITRIANI_105051101221_oke.docx (90.04K)

Word count: 6370

Character count: 43025

ORIGINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	louistalokon.blogspot.com Internet Source	7%
2	rimbakita.com Internet Source	4%
3	docplayer.info Internet Source	3%
4	mediaindonesia.com Internet Source	2%
5	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	2%
6	www.bppt.go.id Internet Source	2%
7	media.neliti.com Internet Source	2%
8	adoc.pub Internet Source	2%
9	eprints.unram.ac.id Internet Source	2%



BAB III Fitriani K. -

105051101221

by Tahap Tutup



Submission date: 30-Jul-2023 12:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2138682312

File name: 04._Bab_III_FITRIANI_105051101221_oke.docx (49.51K)

Word count: 1678

Character count: 11297

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.untad.ac.id

Internet Source

2%

2

a-research.upi.edu

Internet Source

2%

3

www.slideshare.net

Internet Source

2%

4

Aditiya Puspanegara, Suci Apriyanti.
"HUBUNGAN KOMUNIKASI VERBAL DAN NON
VERBAL PERAWAT DENGAN TINGKAT
KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH
SAKIT JUANDA KUNINGAN", Journal of
Nursing Practice and Education, 2020

Publication

2%

5

puisimadagaskar.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB IV Fitriani K. -

105051101221

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Jul-2023 01:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2138366752

File name: 05._Bab_IV_FITRIANI_105051101221.docx (75.57K)

Word count: 2818

Character count: 16873

BAB IV Fitriani K. - 105051101221

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

anyflip.com

Internet Source

3%

2

es.scribd.com

Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Lancang Kuning

Student Paper

2%

4

ppid.sulselprov.go.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB V Fitriani K. -

105051101221

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Jul-2023 01:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2138366918

File name: 06._Bab_V_FITRIANI_105051101221.docx (68.03K)

Word count: 2993

Character count: 19112

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

MATCHED SOURCE



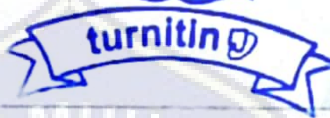
jdih.maritim.go.id
Internet Source



3%

3%

★ **jdih.maritim.go.id**
Internet Source



Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB VI Fitriani K. -

105051101221

by Tahap Tutup



Submission date: 29-Jul-2023 01:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 2138367035

File name: 07._Bab_VI_FITRIANI_105051101221.docx (43.53K)

Word count: 341

Character count: 2278

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ journal.ipb.ac.id

Internet Source



Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



RIWAYAT HIDUP



Fitiriani K., lahir di Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Agustus 1980 anak ke 4 (empat) dari 9 (Sembilan) bersaudara dari pasangan H. Kasim Risang dan Hj. Muliati Djamila. Penulis telah menikah dengan Abu Basra, S.Hut. Penulis telah menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (1987 - 1993), Sekolah Menengah Pertama (1993 - 1996),

Sekolah Kehutanan Menengah Atas (1996 - 1999). Pada Tahun 2006 melanjutkan pendidikan di jenjang Strata Satu (S1) pada jurusan Manajemen Kehutanan pada Universitas Indonesia Timur sampai dengan Tahun 2011. Pada Tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Strata Dua (S2) dengan memilih Program Studi Agribisnis pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis mulai pengabdian pada Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang dipekerjakan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa (2000 - 2016) dan selanjutnya beralih kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada satker Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi mulai Tahun 2016 sampai saat sekarang ini.

Untuk memperoleh gelar Magister Pertanian (MP), penulis mengajukan tesis dengan judul "*Analisis Determinan Pendapatan Rumah Tangga Petani Hutan Dalam Program Perhutanan Sosial Di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa*".